

LAPORAN STUDI
PENGHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN NTT DAN NTB:
KRISIS DAN PERUBAHAN

STUDI KASUS:

DESA AJOBAKI, KECAMATAN MOLLO UTARA, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DESA PENGADANGAN, KECAMATAN PRINGGASELA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DISAMPAIKAN KEPADA OXFAM AUSTRALIA



AKATIGA – PUSAT ANALISIS SOSIAL
Jl. Tubagus Ismail II No. 2
Bandung 40134
Tel. 022-2502302 Fax. 022-2535824
Email: akatiga@indo.net.id
www.akatiga.org

2009

TIM PENULIS LAPORAN

Indrasari Tjandraningsih

Nurul Widyaningrum

TIM PENELITI LAPANGAN

Sarah Hermaniar (Nusa Tenggara Barat)

Jati Mahatmaji (Nusa Tenggara Timur)

Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat miskin pedesaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di masa di antara dua krisis besar yakni krisis Asia 1997 dan krisis finansial AS (global) 2008, termasuk kemungkinan pengaruh krisis finansial global di kedua wilayah termiskin di Indonesia tersebut, yang sekaligus menjadi wilayah kerja Oxfam Australia.

Secara spesifik melalui penelitian ini hendak dijawab - dalam perspektif gender -perubahan apa yang terjadi pada masyarakat dalam kurun 10 tahun terakhir, adakah mereka mengalami krisis dan strategi apa saja yang dibangun dalam menghadapi krisis. Kebutuhan praktis studi ini adalah sebagai input untuk mengembangkan *joint Oxfam Indonesia Country Strategy* dan input terhadap kerja Oxfam di ke dua wilayah tersebut.

Indikator perubahan untuk mengidentifikasi dampak krisis global yang digunakan adalah migrasi karena data-data makro menunjukkan atau memperkirakan terjadinya gelombang besar pemulangan buruh migran dari luar negeri dan penurunan *remittance* sebagai dampak dari krisis global. Selain itu migrasi juga dijadikan indikator untuk melihat perubahan sumber penghidupan dalam masyarakat. Bagi masyarakat NTT dan NTB migrasi di dalam negeri maupun ke luar negeri memang menjadi sumber penghidupan baru yang penting, sekaligus menjadi cara yang paling logis untuk keluar dari kemiskinan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menerapkan metode wawancara dan FGD di dalam melakukan pengumpulan datanya.

Kesimpulan studi adalah sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 10-12 tahun terakhir banyak perubahan yang dialami oleh masyarakat desa NTT dan NTB. Meskipun secara struktural belum terjadi perubahan yang signifikan, kedua provinsi ini masih tetap merupakan provinsi termiskin di Indonesia dengan indeks pembangunan manusia yang rendah, akan tetapi berbagai peningkatan yang menyangkut perbaikan sarana infrastruktur transportasi,

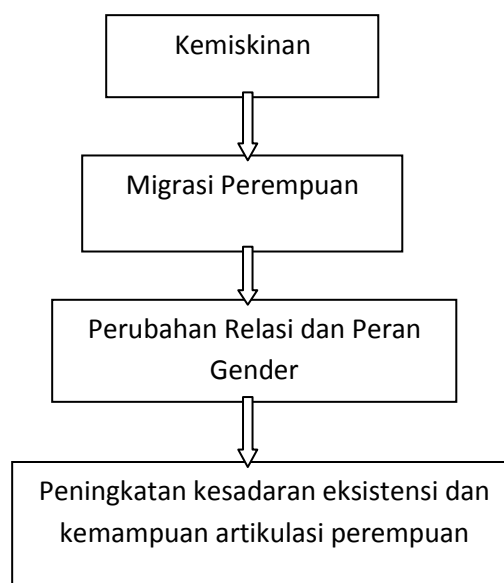
pendidikan dan kesehatan serta bertambahnya keragaman dan akses terhadap kesempatan kerja telah terjadi.

2. Masyarakat desa NTT dan NTB tidak merasakan dampak krisis global terutama karena mereka masih hidup dalam ekonomi subsisten dan pemenuhan kebutuhan hidupnya relative kurang tergantung terhadap ekonomi pasar, serta intergrasinya terhadap ekonomi global masih terbatas.
3. Krisis moneter 1997 juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam bentuk kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarga karena harga yang meroket dan ketersediaan uang tunai yang terbatas. Selain krisis-krisis global, masyarakat desa NTT dan NTB juga mengalami krisis lokal yang disebabkan oleh musim kering yang panjang yang menimbulkan musim paceklik : gagal panen dan kekurangan uang tunai yang berakibat pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.
4. Dalam menghadapi krisis dan mengatasi dampaknya, strategi pokok yang dilakukan adalah mencari pinjaman uang atau barang, mengandalkan sumbangan tetangga atau majikan, berhutang ke warung, mengurangi jumlah pembelian kebutuhan pokok, memakai uang tabungan dan melakukan migrasi.
5. Program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan memberikan kompensasi untuk kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan TDL (Tarif Dasar Listrik) dirasakan oleh warga mulai dari PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), BLT (Bantuan Langsung Tunai), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Raskin (pembagian Beras untuk orang Miskin), dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Selain itu di tingkat provinsi juga dijalankan program-program dari Departemen Sosial di antaranya program untuk warga berusia lanjut dan program khusus untuk perempuan agar tidak terjerumus dalam prostitusi bernama Warsosek – Wanita Rawan kondisi Sosial Ekonomi. Program LSM yang ditemukan di tingkat desa adalah program-program untuk mengatasi kerawanan pangan di NTT dan program pendampingan untuk buruh migran di NTB.
6. Migrasi bagi warga desa NTT dan NTB selain menjadi tumpuan utama usaha untuk memperbaiki kehidupan keluarga, keluar dari kemiskinan serta sebagai strategi untuk menanggulangi dampak krisis, juga telah mampu mengubah peran perempuan yang semula pasif dalam bidang ekonomi menjadi pilar utama sumber

ekonomi keluarga. Jumlah perempuan yang pergi migrasi dari tahun ke tahun terus meningkat dengan tujuan utama ke Malaysia dengan jenis pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.

7. Migrasi mampu mengubah tatanan sosialkultural masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peran gender dan sekaligus mengubah penampilan perempuan desa. Ketika keputusan perempuan untuk bermigrasi diambil karena dorongan kemiskinan, pada saat itu juga telah terjadi perubahan peran gender dalam rumah tangga di mana perempuan memberikan kontribusi ekonomi yang dominan dan tidak jarang menjadi pencari nafkah utama. Pada ketika itu juga konstruksi sosial kultural mengenai tempat perempuan yang seharusnya di lingkup domestik telah mengalami perubahan. Dalam masalah migrasi, semakin meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar negeri dan menjadi penyangga utama kehidupan rumah tangga telah dengan sendirinya menandai bahwa kerja perempuan tidak lagi sebatas ruang domestik. Perempuan telah menjadi pelaku aktif di ruang publik. Implikasi lanjutan dari aktivitas perempuan di ruang publik adalah meningkatnya kesadaran perempuan terhadap eksistensi diri dan bersamaan dengan itu kemampuan mengartikulasi diri juga meningkat, dibandingkan dengan perempuan yang tidak migrasi.

Secara ringkas keterkaitan kemiskinan, migrasi dan perempuan dapat digambarkan sebagai berikut:



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Kotak & Bagan	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang dan Tujuan Studi	1
Mengidentifikasi Dampak Krisis di Masyarakat Miskin Perdesaan: Kerangka Studi dan Metodologi	2
Mengidentifikasi perubahan di tingkat nasional dan regional	3
Menelusuri Perubahan: Tingkat Rumah Tangga dan Komunitas	4
Menelusuri Respon terhadap krisis: individu, rumah tangga, masyarakat, pemerintah, LSM	5
Memilih Lokasi	6
Sumber informasi	6
Susunan Laporan	7
BAB 2 KONDISI MAKRO	8
Indonesia: Dari Krisis Ke Krisis	8
Krisis Ekonomi (“Krismon”) 1997	8
Kenaikan Harga BBM, 2005 dan 2008	9
Krisis Finansial Global 2008	10
Program Sosial	11
Nusa Tenggara Barat	12
Ekonomi Makro	12
Indeks Pembangunan Manusia	13
Kemiskinan	15
Profil migrasi	15
Nusa Tenggara Timur	18
Ekonomi makro	18
Indeks Pembangunan Manusia	18
Migrasi	21

BAB 3 KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DI NTT DAN NTB DALAM KONTEKS PERUBAHAN ...	22
Profil Kabupaten dan Desa Penelitian	22
Desa Ajoabaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	22
Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat	27
Masyarakat Desa dan Ragam Sumber Penghidupan.....	32
Pertanian	32
Ragam Sumber Pendapatan Non-Pertanian	34
Kultur dan Relasi Sosial.....	36
Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.....	37
Migrasi: Titik Perubahan Sosial-Ekonomi-Kultural Masyarakat NTT dan NTB	40
BAB 4 MASYARAKAT DESA DI ANTARA KRISIS.....	49
Krisis Global dan Krisis Lokal.....	49
Dampak Krisis dan Mekanisme Bertahan.....	51
Bantuan Pemerintah dan LSM di Masa Krisis.....	53
BAB 5 WAJAH PERUBAHAN MASYARAKAT DESA NTT DAN NTB: SEBUAH KESIMPULAN	56
Daftar Pustaka	61
Daftar Informan.....	65
Lampiran : Foto.....	68

Daftar Tabel

Tabel 1	Index Pembangunan Manusia Provinsi NTB	14
Tabel 2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin NTB.....	15
Tabel 3	Profil Migrasi dari NTB	16
Tabel 4	Pengiriman TKI dan Remitansi TKI NTB Tahun 2009	17
Tabel 5	Index Pembangunan Manusia Provinsi NTT	20
Tabel 6	Data Penempatan TKI tahun 1998-2009.....	25
Tabel 7	Angka Partisipasi Sekolah Desa Ajoabaki.....	25
Tabel 8	Jumlah Penduduk Miskin di Lombok Timur tahun 2001 – 2008.....	27
Tabel 9	Jumlah TKI Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 10	Jumlah Penduduk Desa Pengadangan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008 ..	29

Daftar Kotak & Bagan

Kotak 1 Profil Buruh Migran Perempuan	45
Kotak 2 Profil Buruh Migran Laki-laki	47
Kotak 3 Keterkaitan Kemiskinan, Migrasi, dan Perempuan	56
Kotak 4 Ilustrasi Perbaikan Kondisi Hidup TKI	59

BAB 1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Tujuan Studi

Pada tahun 2007 dunia dihadapkan pada krisis finansial global. Krisis ini diprediksi banyak ekonom sebagai krisis yang terburuk yang pernah terjadi, dan bahkan negara-negara maju pun mengalami dampaknya dan harus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah jatuhnya sistem finansial negara-negara tersebut. Krisis ini diperkirakan berdampak luas pada negara-negara di seluruh dunia, meskipun dengan derajat yang berbeda-beda.

Indonesia, khususnya, mempunyai pengalaman jatuh dalam krisis ekonomi, yaitu krisis finansial Asia pada tahun 1997. Krisis ekonomi tahun 1997 (yang memuncak menjadi krisis politik dan sosial) telah membawa perubahan yang dramatis dalam situasi politik dan ekonomi Indonesia. Sejumlah pihak menyatakan bahwa belajar dari pengalaman krisis tahun 1998, pemerintah lebih cepat tanggap dan dengan demikian mengurangi kejatuhan ekonomi yang lebih dalam. Akan tetapi terdapat beberapa indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak krisis ini mengalami koreksi.

Di sisi lain, meskipun langkah-langkah yang diambil pemerintah dinilai dapat mencegah guncangan ekonomi bagi masyarakat, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Krisis finansial Asia pada tahun 1997, ditambah beberapa 'guncangan kecil' (misalnya kenaikan bahan makanan pokok, kenaikan harga bahan bakar, dan musim kemarau yang berkepanjangan) menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Krisis finansial global sekarang ini mungkin menambah beban bagi orang miskin di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat miskin pedesaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di masa di antara dua krisis besar yakni krisis Asia 1997 dan krisis finansial AS (global) 2008, termasuk kemungkinan pengaruh krisis global yang melanda Indonesia dan daerah tersebut. Kedua daerah ini termasuk daerah yang paling miskin di Indonesia serta merupakan daerah kerja OXFAM Australia di Indonesia.

Secara spesifik pertanyaan yang hendak dijawab melalui studi ini adalah:

1. Dalam kurun waktu 10 tahun apakah kehidupan masyarakat NTT dan NTB lebih baik atau lebih buruk? Perubahan apa saja yang telah terjadi? Adakah dampak dari krisis global terhadap kehidupan masyarakat?
2. Apakah dalam kurun 10 tahun tersebut masyarakat menjadi lebih kuat atau lebih rentan dalam menghadapi krisis? Faktor apa saja yang mempengaruhinya?
3. Bagaimana respon rumah tangga, masyarakat, organisasi nonpemerintah dan pemerintah dalam menghadapi krisis? Respon mana yang paling efektif?
4. Apakah kaum perempuan mengalami krisis dan dampaknya berbeda dengan kaum lelaki?

Mengidentifikasi Dampak Krisis di Masyarakat Miskin Pedesaan: Kerangka Studi dan Metodologi

Dalam penelitian ini, dampak krisis akan dilihat di kelompok masyarakat miskin di pedesaan. Pertimbangan pertama, studi-studi mengenai dampak krisis finansial global lainnya dilakukan di tingkat makro (lihat misalnya dalam Titiheruw, Soeastro and Atje 2009). Sejumlah studi lain yang tengah berjalan juga melihat kondisi dan dampak krisis pada sektor-sektor yang memang diduga terkena dampaknya, yaitu sektor yang berorientasi ekspor (seperti misalnya SMERU 2009).

Indonesia mengalami krisis finansial yang cukup parah pada tahun 1998 dan meskipun kondisi perekonomian cenderung stabil, terdapat beberapa gejolak yang dinilai memperparah kondisi masyarakat miskin. Sebagai misal, pada tahun 2005 pemerintah Indonesia mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak dua kali, yang diduga meningkatkan jumlah orang miskin Indonesia. Kenaikan harga bahan pangan dunia pada tahun 2007-2008 juga dinilai memperparah kemiskinan di Indonesia. Khusus di NTB dan NTT, pada tahun 2004 terjadi musim kemarau panjang yang mengakibatkan gagal panen dan menyebabkan terjadinya krisis pangan. Oleh karena itu, kondisi yang dialami masyarakat NTT dan NTB sekarang akan sulit dipisahkan dengan kondisi yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya dan akan sulit untuk membedakan secara tegas bahwa kondisi sekarang merupakan dampak dari krisis finansial global. Oleh karena itu, penelusuran dampak krisis di NTT dan NTB didekati dengan penelusuran perubahan kondisi masyarakat miskin di NTT dan NTB dalam rentang waktu antara dua krisis finansial (1997 – 2009).

Secara khusus studi ini juga akan melihat perubahan migrasi, baik dari sisi jumlah migran maupun remitansi di NTT dan NTB. Migrasi merupakan salah satu kegiatan yang diduga akan cukup terpengaruh oleh krisis finansial global. Dugaannya adalah penurunan kondisi ekonomi di negara-negara tujuan migran (yang umumnya merupakan negara kaya) akan mendorong terjadinya PHK bagi buruh migran dan dengan demikian mendorong arus balik ke kampung asal serta memotong remitans. Di kedua provinsi miskin tersebut, angka migrasi cukup tinggi dan kedua provinsi tersebut mempunyai tingkat ketergantungan pada remitans yang cukup tinggi. Pada tahun 2004 misalnya, angka remitansi yang masuk ke kedua daerah tersebut sebesar dua kali lipat dari pendapatan asli daerah (World Bank, 2006).

Mengidentifikasi perubahan di tingkat nasional dan regional

Perubahan-perubahan di tingkat nasional maupun lokal mungkin menyebabkan kondisi masyarakat miskin pedesaan di NTT dan NTB lebih baik atau lebih buruk. Kondisi yang berhasil diidentifikasi antara lain:

- Krisis pangan dan bahan bakar dunia pada tahun 2005. Di Indonesia, krisis ini menyebabkan pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebuah analisis memperkirakan bahwa pencabutan BBM ini meningkatkan jumlah orang miskin Indonesia sebanyak 5.39% atau sejumlah 11.5 juta orang (Hastuti 2006, dalam Widjaja, 2009). Kenaikan BBM ini ditambah dengan pemberlakuan Tarif Dasar Listrik non subsidi pada tahun 2008. Meskipun kenaikan ini hanya dikenakan pada industri dan rumah tangga dengan kapasitas besar, diperkirakan kenaikan TDL ini akan meningkatkan biaya produksi bahan kebutuhan masyarakat. Untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah meluncurkan program Beras Miskin dan Bantuan Langsung Tunai
- Kekeringan dan Krisis Pangan, terutama di NTT. Kementerian Negara Koordinator Kesejahteraan Rakyat mencatat bahwa kekeringan pada tahun 2009 menyebabkan sekitar 13 kabupaten di NTT terancam krisis pangan. Di ketigabelas kabupaten tersebut, total warga yang terkena dampak krisis pangan berjumlah 295.638 orang atau 106.613 kepala keluarga (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2008).

Data-data untuk melihat perubahan di tingkat nasional dan regional ini dikumpulkan melalui data sekunder dan wawancara dengan pekerja LSM, staf lembaga donor/lembaga

pembangunan multinasional, aparat pemerintah nasional dan lokal. Data sekunder yang dihimpun meliputi data-data kependudukan dan perekonomian di NTT dan NTB, data migrasi dan remitansi, serta berbagai indikator kemiskinan.

Dari data sekunder dan wawancara tersebut, dianalisis perubahan yang terjadi di tingkat regional NTT dan NTB. Perubahan tersebut meliputi perubahan-perubahan pada infrastruktur dan jasa pelayanan publik, perubahan pola penghidupan masyarakat NTT dan NTB, perubahan profil kependudukan terutama dari tingkat pendidikan serta tingkat kesehatan, serta perubahan pada migrasi dan ketenagakerjaan.

Menelusuri Perubahan: Tingkat Rumah Tangga dan Komunitas

Bagi penduduk miskin, melihat apakah krisis berpengaruh terhadap mereka bisa jadi sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena kemiskinan yang mereka rasakan sudah kronis sehingga perubahan apapun yang terjadi di tingkat makro bisa jadi tidak berpengaruh pada mereka. Sebuah studi AKATIGA menunjukkan bahwa kondisi miskin yang terus menerus menyebabkan keluarga buruh miskin di daerah industri sulit mengidentifikasi saat sulit, bagi mereka, lebih mudah mengingat saat-saat senang (Setia, 2005).

Pengalaman dari krisis sebelumnya menunjukkan bahwa dampak krisis bisa dialami berbeda oleh kelompok masyarakat yang berbeda. Studi AKATIGA – TAF (1999) misalnya, menunjukkan bahwa pada krisis tahun 1997, sektor yang berorientasi ekspor justru menanggung keuntungan dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, sementara sektor yang berorientasi pasar dalam negeri mengalami penurunan. Krisis juga lebih dirasakan masyarakat perkotaan dibandingkan perdesaan (lihat misalnya dalam AKATIGA 2001). Sementara krisis finansial global 2008 justru berpengaruh pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor serta diduga berpengaruh pada tingkat migrasi melalui PHK buruh-buruh migran di luar negeri akibat melemahnya kondisi ekonomi di negara tujuan (Tititheruw, Soeastro, & Atje, 2009).

Untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dialami masyarakat miskin pedesaan, studi ini meminta masyarakat miskin mendefinisikan saat susah dan saat senang bagi mereka. Identifikasi ini dilakukan melalui wawancara dan diskusi terbatas dengan kelompok laki-laki penduduk desa dan kelompok perempuan penduduk desa. Hasil wawancara dan FGD ini kemudian dikaitkan dengan masa-masa krisis dan perubahan di tingkat makro yang dikumpulkan melalui data sekunder pada tahapan sebelumnya. Wawancara mendalam dilakukan pada rumah tangga miskin baik yang mempunyai anggota keluarga migran

maupun bukan. Wawancara juga dilakukan pada rumah tangga miskin dengan perempuan sebagai kepala keluarga untuk melihat adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dengan laki-laki serta dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Latar belakang rumah tangga, meliputi tingkat pendidikan kepala keluarga, status migrasi, mata pencarian anggota rumah tangga, memberikan gambaran apakah perubahan di tingkat rumah tangga tersebut merupakan dampak dari krisis-krisis atau bukan.

Menelusuri Respon terhadap krisis: individu, rumah tangga, masyarakat, pemerintah, LSM

Krisis pada tahun 1997 telah mendorong pemerintah Indonesia, dengan dukungan lembaga pembangunan internasional, mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik sebagai jaring pengaman maupun sebagai program yang berkelanjutan. Selain itu, untuk memitigasi dampak krisis finansial global 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan paket stimulus yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan larinya dana-dana ke luar negeri serta mempertahankan daya beli masyarakat agar tidak turun.

Baik kebijakan paket stimulus serta berbagai program anti kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu masyarakat untuk menghadapi dampak krisis. Meskipun demikian, program-program ini serta anggaran pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat miskin (kesehatan dan pendidikan) dapat berkurang akibat sebagian dana terserap untuk mengatasi krisis. Studi ini mengidentifikasi pemanfaatan bantuan-bantuan pemerintah oleh masyarakat miskin di NTT dan NTB. Data mengenai program dan kebijakan pemerintah dikumpulkan dari literatur dan berita surat kabar, sedangkan informasi mengenai pemanfaatannya dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat desa maupun dengan rumah tangga miskin.

Berbagai studi juga telah melihat strategi yang dilakukan oleh masyarakat miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi. Studi ini secara khusus mencoba melihat strategi yang dilihat masyarakat miskin di NTT dan NTB serta jaringan yang mereka bangun untuk meminta pertolongan. Banyak studi telah menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki melakukan strategi yang berbeda untuk merespon kondisi krisis, oleh karenanya penggalan data di dalam studi ini juga melihat perbedaan antara respon kelompok laki-laki dan perempuan. Sejauh data dimungkinkan, pemilahan data-data berdasarkan gender di tingkat makro akan juga dicoba untuk dilakukan.

Memilih Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Kedua provinsi ini merupakan daerah termiskin di Indonesia dengan tingkat migrasi yang cukup tinggi. Kedua daerah ini juga merupakan daerah kerja OXFAM Australia.

Kabupaten yang dipilih adalah kabupaten yang mempunyai tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, tingkat migrasi yang cukup tinggi baik migrasi internal maupun transnasional, serta merupakan daerah dengan basis pertanian. Pemilihan kabupaten dilakukan setelah melakukan wawancara dengan pekerja LSM, peneliti, maupun dari penelusuran data sekunder. Dari hasil penelusuran tersebut ditetapkan bahwa penelitian dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan kasus studi Desa Ajoabaki, kecamatan Mollo Utara untuk Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Lombok Timur, dengan kasus studi Desa Pengadangan di Kecamatan Pringgasela untuk Nusa Tenggara Barat.

Sumber informasi

Studi ini mengumpulkan informasi di tingkat nasional, regional dan desa dalam bentuk data primer dan sekunder untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang terjadi di berbagai tingkatan tersebut. Informasi di tingkat nasional dikumpulkan untuk melihat bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga donor serta institusi yang berkait melihat krisis dan kebijakan nasional dalam menanggulangi krisis. Informasi di tingkat regional dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran mengenai program-program dan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan krisis, kemiskinan dan migrasi. Data di tingkat desa dikumpulkan untuk mendapatkan informasi empirik mengenai dinamika kehidupan dan perubahan sosial-ekonomi-kultural masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun, dalam perspektif gender.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan FGD. Di tingkat nasional, telah diwawancarai 13 narasumber yang meliputi pekerja LSM buruh migran dan pembangunan desa serta staf lembaga internasional. Di tingkat provinsi dan kabupaten diwawancarai 21 narasumber yang meliputi staf instansi pemerintah terkait (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, BPMD), akademisi, serta staf LSM lokal. Di tingkat desa diwawancarai 24 orang dan , termasuk di dalamnya 6 rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yang diwawancarai adalah rumah tangga miskin dengan perempuan sebagai kepala keluarga, rumah tangga miskin dengan anggota keluarga laki-laki yang bermigrasi, serta rumah tangga miskin dengan

anggota keluarga perempuan yang bermigrasi. FGD dilakukan 4 kali masing-masing dengan 2 kelompok perempuan dan 2 kelompok laki-laki.

Susunan Laporan

Laporan ini disusun dalam lima bab. **Bab pertama**, seperti telah disampaikan, menjelaskan latar belakang, tujuan, kerangka pikir dan metodologi studi. **Bab kedua** menjelaskan konteks dari studi, yaitu situasi perekonomian dan profil kemiskinan di Indonesia serta pengaruh pengaruh krisis global finansial pada kondisi ekonomi makro, serta profil ekonomi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. **Bab ketiga** menjelaskan kondisi kehidupan masyarakat desa dalam konteks perubahan

Bab keempat menjelaskan pengalaman hidup di antara krisis yang dialami warga desa dan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat individu dan rumah tangga, serta strategi individu/rumah tangga dalam menghadapi krisis, termasuk peran-peran jaringan sosial, LSM, serta pemerintah bagi individu dan rumah tangga di NTT dan NTB. **Bab lima** menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran.

BAB 2

KONDISI MAKRO

Indonesia: Dari Krisis Ke Krisis

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum tahun 1997 merupakan salah satu yang tertinggi di Asia, sehingga banyak pihak memperkirakan Indonesia akan tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia. Namun krisis finansial Asia tahun 1997 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh fondasi yang rapuh, sehingga guncangan moneter yang pertama kali menimpa Thailand tersebut ternyata berdampak sangat dalam di Indonesia. Krisis tersebut telah meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia dan berujung pada jatuhnya 32 tahun pemerintahan Soeharto. Pada periode berikutnya terdapat beberapa kondisi yang melemahkan perekonomian Indonesia.

Krisis Ekonomi (“Krismon”) 1997

Dampak krisis ekonomi 1997 (yang lebih dikenal dengan nama krisis moneter, ‘krismon’) sangat terasa di Indonesia. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi anjlok dari angka 4.6 % pada tahun 1996 menjadi -13.8% pada tahun berikutnya.

Berbagai studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dampak krisis di daerah atau kelompok ekonomi yang berbeda. Studi SMERU misalnya menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan lebih terpukul dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Di samping itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa dampak krisis sangat beragam – seluruh daerah perkotaan dan pedesaan di Jawa terpukul oleh krisis, sementara sebagian besar masyarakat di Sumatra, Sulawesi, dan Maluku hanya mengalami sedikit dampak saja. Terdapat pula daerah-daerah yang mengalami dampak negatif, tetapi terdapat kondisi lain yang mungkin menyebabkan dampak negatif tersebut seperti kekeringan di NTB dan NTT serta kebakaran hutan di Kalimantan Timur (SMERU 1998). Survey terhadap sekitar 800 pengusaha kecil dari sektor perkebunan, industri manufaktur, serta jasa juga menunjukkan heterogenitas dampak krisis tersebut. Pada awal krisis, ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok, sektor-sektor yang berorientasi pasar ekspor seperti produk perkebunan (antara lain kakao, kopi, kelapa) mengalami booming. Beberapa jenis industri kecil yang berorientasi pasar ekspor dan berbahan baku lokal juga mengalami booming, misalnya

industri mebel di Jepara (Jawa Tengah) yang menggunakan bahan baku kayu jati (AKATIGA dan The Asia Foundation – 1999).

Kenaikan Harga BBM, 2005 dan 2008

Meskipun mendapatkan banyak kritik, pada tahun 2005 Pemerintah menaikkan harga BBM sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober 2005. Pada bulan Maret, secara umum harga BBM naik sebesar 29% , sementara pada bulan Oktober 2007 kenaikan BBM rata-rata berkisar pada angka 87,5% (Widjaja, 2009) Diperkirakan bahwa kenaikan BBM pada tahun 2005 meningkatkan jumlah orang miskin sebanyak 5.39% atau sejumlah 11.5 juta orang (Hastuti 2006, dalam Widjaja, 2009). Pembagian BLT diharapkan dapat mengurangi kenaikan jumlah orang miskin tersebut dari 5.39% menjadi ‘hanya’ 1.21%, dengan asumsi bahwa semua dana tersebut tepat sasaran (Hastuti 2006 dalam Widjaja, 2009).

Pada tahun 2008 pemerintah kembali menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 30% (Widjaja, 2009). Pemerintah Indonesia berargumen bahwa dampak kenaikan BBM tahun 2005 ini tidak akan membawa dampak terlalu besar pada masyarakat dengan adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah (lihat di bawah).

Untuk mengurangi dampak sosial dari naiknya harga BBM tersebut, pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu pemberian uang tunai pada kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin untuk mengurangi dampak kenaikan BBM. Jumlah uang yang diberikan sama untuk tiap rumah tangga, yaitu sebesar Rp 300.000, 00 per rumah tangga. Dana untuk program ini diambil dari pemotongan subsidi harga BBM, dan program ini hanya bersifat sementara, yaitu sebagai respon terhadap kenaikan BBM. Tidak seperti program bantuan lainnya, tidak ada batasan atau ketentuan mengenai penggunaan uang tersebut.

Pemerintah melalui Bappenas berpendapat bahwa meskipun masih terjadi berbagai penyimpangan di dalam pembagiannya, program BLT Tahap 2 di tahun 2008 ini dinilai telah meningkatkan daya beli masyarakat hingga 10% dibandingkan dengan mereka yang tak menerima BLT, lebih tinggi kenaikan daya beli di BLT Tahap I yang hanya 6% (Kontan Online, 2009)

Program BLT ini banyak mengundang kritik, mulai dari filosofi pemberian uang tunai itu sendiri kepada masyarakat miskin yang dianggap tidak mendidik sampai dengan teknis pembagian yang tidak tepat sasaran. Di beberapa tempat, pembagian BLT menimbulkan konflik di antara warga yang merasa dirinya berhak menerima namun tidak termasuk dalam daftar penerima BLT. Pada pembagian BLT tahun 2008 misalnya terdapat sejumlah termasuk aparat desa, yang menolak pembagian BLT (Antara News, 2008). Widjaja (2009) menemukan bahwa mayoritas keluarga menggunakan uang BLT tersebut sebagai untuk membayar hutang pribadi atau keperluan belanja yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan mereka.

Krisis Finansial Global 2008

Gambaran mengenai dampak krisis finansial global di tingkat nasional ini nampaknya masih belum terlalu dapat dipastikan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kajian yang dilakukan oleh CSIS bersama ODI menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan terakhir 2008 adalah sebesar 5.2%, turun dari perkiraan semula sebesar 5.3% (Titheruw, Soeastro, Atje 2009). Pada tahun 2009, meskipun pemerintah mematok prediksi angka pertumbuhan sebesar 6.0% di dalam menyusun APBN 2009, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi pada tahun ini hanya mencapai 4.3% (<http://www.indonesia.go.id>).

Dari sisi perdagangan internasional, studi yang sama menunjukkan bahwa kinerja ekspor Indonesia cenderung menurun sejak triwulan kedua tahun 2008, bahkan pertumbuhan ekspor di tahun ini adalah yang terendah sejak tahun 1986 (Titheruw, Soeastro, & Atje, 2009). Namun baru-baru ini Menteri Perdagangan menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia di tahun 2009 cenderung naik. Nilai ekspor tahun 2009 diperkirakan hanya sebesar minus 15%, naik dari perkiraan awal sebesar minus 20% (Antaraneews, 2009).

Jumlah pengiriman TKI dan remitansi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2008 juga tidak mengalami perubahan (Titheruw, Soeastro, Atje 2009), meskipun studi tersebut memperkirakan bahwa pekerja di sektor perkebunan sawit akan mengalami PHK besar-besaran di tahun 2008. BPNTKI bahkan optimis bahwa pada tahun 2009 pengiriman TKI akan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Indikator-indikator makro di atas mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan melambat dan ekspor cenderung melambat, terdapat peluang bahwa Indonesia tidak akan terkena dampak krisis separah pada krisis tahun 1997. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dengan cepat mengambil kebijakan-kebijakan untuk mencegah

dampak krisis. Kebijakan pemerintah tersebut meliputi kebijakan-kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas moneter dan mencegah larinya modal ke luar Indonesia, paket stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya tahan dan daya saing sektor riil untuk mencegah terjadinya PHK, kebijakan-kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk mengurangi impor ilegal ke Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang mengalami PHK. Untuk mengantisipasi naiknya angka kemiskinan akibat krisis, pemerintah dalam APBN 2009 juga mengalokasikan sejumlah dana untuk berbagai program sosial (penjelasan di bawah).

Program Sosial

Berbagai program penanggulangan kemiskinan diluncurkan pemerintah pusat terutama sejak krisis tahun 1997. Sejumlah program tersebut merupakan program yang sengaja dirancang untuk mengurangi dampak kebijakan pemerintah, seperti program beras miskin (raskin) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan untuk mengantisipasi kenaikan BBM, dan sejumlah lainnya merupakan kelanjutan dari program pemerintah untuk merepson krisis 1997-1998.

APBN 2009 menetapkan bahwa salah satu prioritas belanja negara adalah untuk peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan sebesar Rp 142.871 miliar rupiah. Di dalam prioritas ini, pengurangan kemiskinan mendapatkan anggaran sebesar Rp 42.923 miliar rupiah, pembangunan pendidikan Rp 82.984 miliar rupiah (merupakan 20% dari total APBN pemerintah, seperti diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi), pos kesehatan sebesar Rp 5.029,7, dan pembangunan perdesaan sebesar Rp 11.934 miliar rupiah. Subsidi pemerintah yang masih akan dipertahankan terutama difokuskan pada kelompok masyarakat miskin, meliputi subsidi pangan (Raskin), subsidi benih dan pupuk, subsidi bunga kredit program untuk program kepemilikan rumah sederhana sehat dan rumah susun, serta subsidi pajak bagi sektor-sektor prioritas. Pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan sosial yang akan diberikan untuk pos cadangan penanggulangan bencana serta program pengentasan kemiskinan (Siaran Pers Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008).

Sedikitnya ada empat program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah pusat:

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat pemerintah lokal dan institusi masyarakat, serta memperbaiki tata pemerintahan lokal. Saat ini, PNPM meliputi hampir

separuh desa di Indonesia dan diharapkan akan mencakup seluruh 80.000 desa dan kota di Indonesia pada tahun 2009. PNPM Mandiri merupakan salah satu program yang mempunyai program khusus untuk perempuan, yaitu dalam bentuk simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Pada partisipasi

- Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan bantuan kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin dengan persyaratan bahwa rumah tangga tersebut mengirim kembali anak-anak usia wajib belajar (6 -15 tahun) kembali bersekolah serta menggunakan Puskesmas jika terdapat anggota keluarga yang sakit. Nilai uang yang diterima bervariasi antar rumah tangga tergantung besar kecilnya jumlah anggota keluarga.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini memberikan bantuan pada sekolah-sekolah untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya BOS, maka siswa SD dan SMP akan dibebaskan dari biaya operasional belajar-mengajar.
- Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Program ini memberikan asuransi kesehatan yang bersifat universal bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin.

Program-program tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, dan dalam kaitan dengan krisis, diharapkan dapat mengurangi dampak krisis terutama bagi masyarakat miskin.

Nusa Tenggara Barat

Ekonomi Makro

Kegiatan ekonomi NTB yang dilakukan oleh rakyat utamanya berbasis di sektor pertanian. Namun dalam konteks kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar yaitu berkisar antara 37% pada tahun 2007, karena sektor ini merupakan sektor yang berorientasi ekspor dengan produk konsentrat tembaga. Pada awal tahun 2009, anjloknya harga tambang internasional akibat krisis global menyebabkan pertumbuhan ekonomi di NTB sedikit melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun kemudian kembali mengalami peningkatan

pada triwulan ketiga tahun 2009. Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertambangan diprediksi mampu tumbuh sebesar 21,97% (*year-on-year*) sementara perekonomian Nusa Tenggara Barat diprediksi mampu tumbuh positif sebesar 8,11% (yoy) sejalan dengan pemulihan ekonomi global (Bank Indonesia Mataram, 2009c).

Website resmi pemerintah NTB menyebutkan bahwa pondasi kegiatan ekonomi utama NTB sebenarnya merupakan sektor pertanian, yang berorientasi lokal. Peranan sektor pertanian (dengan mengeluarkan sektor pertambangan) dalam PDRB sekitar 33%. Sektor ini tentunya juga merupakan sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2009).

Laju inflasi rata-rata provinsi NTB cenderung lebih tinggi dibandingkan laju inflasi nasional. Pada triwulan ketiga 2009, laju inflasi mencapai level 4,63% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (4,66%), namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (2,83%) (Bank Indonesia Mataram, 2009c).

Dari indikator makro tersebut di atas, terdapat kesan bahwa krisis global membawa sedikit dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi NTB khususnya karena sektor pertambangan yang menjadi penyumbang PDRB terbesar, mengalami kontraksi. Indikator ekonomi makro tersebut mulai membaik pada tahun 2009. Namun dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak terlalu besar, seperti ditunjukkan dalam Bab Tiga dan Bab Empat

Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang menempati ranking terendah dalam IPM. Tingkat pendidikan yang lebih rendah, tingkat harapan hidup, lama sekolah, serta pengeluaran riil yang rendah menyebabkan provinsi ini mempunyai IPM yang cukup rendah, meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tabel 1
Index Pembangunan Manusia Provinsi NTB

Komponen	Tahun	Nilai
Angka harapan hidup	1999	57,8
	2002	59,3
	2004	59,4
	2005	60,5
Angka melek huruf	1999	72,8
	2002	77,8
	2004	78,3
	2005	78,8
Lama sekolah	1999	5,2
	2002	5,8
	2004	6,4
	2005	6,6
Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan	1999	565,9
	2002	583,1
	2004	611,0
	2005	623,2
HDI	1999	54,2
	2002	57,8
	2004	60,6
	2005	62,4
Rangking *	1999	26
	2002	30
	2004	33
	2005	32

Sumber: BPS 2009 (www.bps.go.id)

Keterangan: * rangking telah disesuaikan dengan jumlah provinsi

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di NTB, baik dari sisi jumlah total maupun persentase terhadap jumlah penduduk, cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, dipicu kenaikan harga BBM sebanyak dua kali, terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin, namun angka tersebut kemudian menurun pada tahun 2007.

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin NTB

Tahun	Jumlah	Persentase
2000	1.070.430	28,13
2001	1.175.500	30,43
2004	1.031.605	25,26
2005	1.136.524	25,92
2006	1.156.144	27,17
2007	1.118.452	24,99

Sumber: Website resmi Pemerintah Provinsi NTB

Profil migrasi

Pada tahun 2008 Bank Indonesia menyelenggarakan survey tentang TKI. Dari hasil survey tersebut, gambaran yang diperoleh mengenai profil migrasi transnasional dari NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Profil Migrasi dari NTB

Karakteristik	Profil
Usia	27 – 30 tahun (25,4%)
Jenis kelamin	Laki-laki 68,6% Perempuan 31,4%
Latar belakang pendidikan	SD 41,81% SMP 33,79%
Negara Tujuan	Malaysia (perkebunan) Arab Saudi (pembantu rumah tangga) Jepang
Sektor	Perkebunan 54,35% Pembantu Rumah Tangga 25,78%
Penghasilan Rata-rata	Perkebunan Rp 1,7 juta Pembantu Rumah Tangga 1.4 juta

Sumber: Bank Indonesia Mataram, 2009b

Bank Indonesia Kantor Mataram dalam laporan triwulannya mencatat penurunan jumlah migran dari NTB pada tahun 2009. Pada triwulan pertama tahun 2009, terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu -59,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tahun 2009 menunjukkan penurunan jumlah migran yang berangkat. Laporan tersebut menyatakan bahwa penurunan ini terjadi sebagai akibat krisis global yang berdampak pada penurunan harga komoditas pertanian, sementara mayoritas migran dari NTB bekerja di sektor pertanian kelapa sawit di Malaysia. Namun dugaan ini dibantah oleh salah satu staf BP3TKI, yang menyatakan tidak ada pemulangan migran dari Malaysia akibat PHK (Komang, 2009).

Meskipun terjadi penurunan jumlah migran yang berangkat dari NTB, data remitansi justru menunjukkan adanya peningkatan. Sepanjang tahun 2009, jumlah remitansi yang masuk tercatat sebesar Rp 485 miliar, naik sebesar 30.2% dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan tersebut berpendapat bahwa kenaikan ini lebih disebabkan oleh melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang lain di dunia sehingga terjadi peningkatan

jumlah uang yang dapat dikirim oleh migran (Bank Indonesia Mataram, 2009a), serta adanya peningkatan upah/gaji migran di negara tujuan dan peningkatan penggunaan jasa perbankan untuk pengiriman uang (Bank Indonesia Mataram, 2009c).

Nilai remitansi tersebut melebihi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB, yang pada tahun 2009 diperkirakan akan mencapai Rp 476 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi penduduk NTB. Patut diingat pula bahwa data yang ditampilkan oleh Bank Indonesia ini merupakan data migrasi legal, yaitu migrasi yang dilakukan oleh PJTKI. Tidak ada perkiraan data yang cukup pasti mengenai jumlah migrasi ilegal dari NTB, sehingga tidak dapat diketahui seberapa besar data dari Bank Indonesia ini telah menggambarkan besaran migrasi dan remitansi di NTB.

Tabel 4

Pengiriman TKI dan Remitansi TKI NTB Tahun 2009

Triwulan	Jumlah TKI	Nilai Remitans
I (Januari-Maret)	12.818	Rp168 miliar
II (April – Juni)	12.308	Rp 237 miliar
III (Juli – September)	10.184	Rp163 miliar

Sumber: (Bank Indonesia Mataram, 2009a, 2009b, 2009c)

Nusa Tenggara Timur

Ekonomi makro

Bersama-sama dengan NTB, NTT merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Pertanian merupakan sektor dominan di NTT. Pada tahun 2007, sektor ini menyumbang sekitar 40% kontribusi dalam PDRB. Jenis pertanian yang mendominasi adalah pertanian pangan. Kontribusi sektor lain yang cukup besar adalah sektor jasa terutama pemerintahan, yang menyumbang sekitar 30% PDRB pada tahun yang sama.

Ekonomi NTT merupakan ekonomi subsisten, namun dapat terpengaruh oleh harga terutama untuk produk ternak (yang merupakan subsector kedua setelah tanaman pangan dalam sektor pertanian). Bank Indonesia Cabang Kupang mencatat bahwa pada tahun 2009 perekonomian di NTT tetap tumbuh meskipun mengalami kontraksi (Kantor Bank Indonesia Kupang, 2009c).

Pertanian merupakan sektor dominan di NTT. Pada tahun 2007, sektor ini menyumbang sekitar 40% kontribusi dalam PDRB. Jenis pertanian yang mendominasi adalah pertanian pangan (Barlow & Gondowarsito, 2007). Kontribusi sektor lain yang cukup besar adalah sektor jasa terutama pemerintahan, yang menyumbang sekitar 30% PDRB pada tahun yang sama. Pada tahun-tahun berikutnya, kontribusi sektor pertanian ini masih paling tinggi, namun nilai kontribusinya menurun dan pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan sektor lainnya terutama sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (Kantor Bank Indonesia Kupang, 2009c).

Indeks Pembangunan Manusia

Bersama-sama dengan NTB, NTT merupakan salah satu provinsi dengan IPM terendah di Indonesia, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan masih kurang di NTT. Buruknya fasilitas transportasi dan infrastruktur jalan juga menyebabkan sulitnya akses masyarakat miskin di NTT (Barlow & Gondowarsito, 2007).

Sebuah kajian mengenai NTT menunjukkan bahwa meskipun perlahan, terjadi peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan di NTT, yang berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan di sana (Barlow & Gondowarsito, 2007). Namun demikian, peningkatan ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia sehingga angka IPM NTT pun masih termasuk yang paling rendah di Indonesia.

NTT juga merupakan daerah rawan pangan. Kemiskinan, kekeringan yang panjang dan silih berganti dengan banjir menyebabkan daerah ini sering mengalami kondisi rawan pangan. Kajian yang dilakukan oleh empat lembaga internasional menunjukkan bahwa indikator-indikator kesehatan anak-anak serta perempuan di NTT buruk, antara lain ditandai dengan tingginya angka malnutrisi (kronis dan akut) pada anak-anak usia 0 – 59 bulan, tingkat gizi yang buruk pada perempuan hamil dan menyusui, tingkat imunisasi dan pemberian vitamin tambahan yang rendah. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan status rawan pangan (*food insecure*) cukup tinggi yaitu 91.4%. Indikator lain dari kerawanan pangan di NTT adalah tingginya proporsi belanja rumah tangga untuk belanja pangan (rata-rata 73% belanja rumah tangga jatuh ke pangan), dibarengi dengan rendahnya belanja untuk konsumsi pangan yang bersumber dari hewan, yaitu hanya sekitar 5% dari total belanja pangan (CWS, Hellen Keller International, Care International Indonesia, UNICEF, OCHA, 2008).

Kondisi kemiskinan yang cukup tinggi di NTT ini menjadikan NTT sebagai salah satu daerah tujuan program penanggulangan kemiskinan oleh lembaga-lembaga internasional. Bapeda NTT dalam Barlow dan Gondowarsito (2007) mencatat bahwa pada tahun 2005, kontribusi lembaga-lembaga internasional ini mencapai Rp 122.7 miliar. Angka ini hanya mencakup lembaga-lembaga internasional dan lokal yang tercatat di Bapeda saja, belum mencakup keseluruhan dana yang turun ke NTT di luar yang tercatat oleh Bapeda yang diperkirakan mencapai angka Rp 40 millar. Kebanyakan lembaga tersebut beroperasi di pedesaan dengan kegiatan berkisar pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, perdagangan, serta peningkatan pendapatan rumah tangga.

Tabel 5
Index Pembangunan Manusia Provinsi NTT

Komponen	Tahun	Nilai
Angka harapan hidup	1999	63,6
	2002	63,8
	2004	64,4
	2005	64,5
Angka melek huruf	1999	81,2
	2002	84,1
	2004	85,2
	2005	85,6
Lama sekolah	1999	5,7
	2002	6,0
	2004	6,2
	2005	6,3
Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan	1999	576,9
	2002	563,1
	2004	585,1
	2005	589,9
HDI	1999	60,4
	2002	60,3
	2004	62,7
	2005	63,6
Rangking *	1999	24
	2002	28
	2004	31
	2005	31

Sumber: BPS 2009 (www.bps.go.id)

Keterangan: * rangking telah disesuaikan dengan jumlah provinsi

Migrasi

Didorong oleh kemiskinan di NTT, banyak tenaga kerja NTT yang bermigrasi ke luar negeri maupun ke daerah lain. Pemerintah NTT mencatat bahwa sebanyak 40.000 orang atau sekitar 15,02% dari total TKI legal Indonesia berasal dari NTT. Negara tujuan utama adalah Malaysia, dengan mayoritas pekerja NTT di Malaysia (sebanyak 23.5%) bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pemerintah NTT juga mencatat bahwa pada tahun 2006-2008 gaji yang diterima migran NTT rata-rata adalah Rp 1.250.000. Cukup banyak TKI yang baru menerima utuh gajinya setelah bekerja selama enam bulan, karena gaji lima bulan pertama dipotong oleh PJTKI sebagai kompensasi biaya pelatihan. Pada umumnya kontrak para TKI ini hanya selama dua tahun, dan hal ini menyebabkan para TKI cenderung menyimpan uangnya dan membawa keseluruhannya pada waktu pulang daripada mengirimkan lewat bank. Sekitar 80% TKI menyebutkan bahwa tabungan yang terkumpul ketika selesai bekerja berkisar antara Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000. Total uang yang beredar sebagai hasil remitansi di NTT pada tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp Rp 478,8 miliar, lebih tinggi dari rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT tahun 2009, yaitu Rp 223,85 miliar (Website Pemerintah NTT, 2009).

BAB 3

KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DI NTT DAN NTB DALAM KONTEKS PERUBAHAN

Perubahan yang terjadi pada masyarakat NTT dan NTB dalam kurun di antara dua krisis merupakan jalinan perubahan eksternal dan internal. Meskipun secara struktural di tingkat regional belum terjadi perubahan yang signifikan, kedua provinsi ini masih tetap merupakan provinsi termiskin di Indonesia dengan indeks pembangunan manusia yang rendah, akan tetapi berbagai peningkatan yang menyangkut perbaikan sarana infrastruktur dan keragaman kesempatan kerja telah terjadi. Selain memperlihatkan karakteristik masyarakat desa, bab ini juga menguraikan bagaimana migrasi selain menjadi tumpuan utama untuk usaha memperbaiki kehidupan keluarga dan keluar dari kemiskinan juga telah mampu mengubah peran gender perempuan dari perannya yang pasif dalam bidang ekonomi menjadi pilar utama sumber ekonomi keluarga.

Profil Kabupaten dan Desa Penelitian

Desa Ajoabaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Soe sebagai ibukotanya, berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara pada bagian sebelah Utara, kemudian Laut Timor di sebelah Selatan, Kabupaten Kupang di sebelah Barat dan Kabupaten Belu di bagian Timurnya. Menjangkau Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Kabupaten Kupang atau Kota Kupang, termasuk sulit karena karakteristik geografisnya yang berbukit-berbukit dan jalan yang berliku-liku. Jarak antara kota Kupang dan Soe sekitar 120 km. Untuk mencapainya, ada rute perjalanan dari terminal Kupang, berupa bus antar-kota-antar propinsi dengan waktu tempuh sekitar dua jam setengah, dan biaya sekitar dua puluh ribu rupiah, atau jika menggunakan *travel* dengan biaya sekitar empat puluh rima ribu rupiah hingga lima puluh ribu rupiah.

Kabupaten Timor Tengah Selatan beriklim tropis dengan curah hujan yang hanya terjadi selama empat bulan dalam setahun yaitu sekitar bulan Juli-Oktober, dan sisanya, November-

Juni adalah musim panas. Curah hujan yang rendah ini disebabkan oleh letaknya yang lebih dekat dengan Daratan Australia daripada dengan Daratan Asia.

Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan lebih senang disebut sebagai 'orang Timor', yaitu orang yang lahir dan besar dari daratan Timor. Penduduk yang sekarang mendiami Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari beragam etnis, mulai dari orang Timor sebagai orang asli, Flores, Sumba, Alor, Cina, Bugis, dan Jawa. Mayoritas penduduknya beragama Kristen dan ini tampak dari hamparan pemandangan bangunan hamparan pemandangan bangunan Gereja dengan gaya Gothic dan Renaissance selalu menarik perhatian untuk disinggahi.

Jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 416.876 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan. Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah salah satu kabupaten termiskin di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan indikator rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat IPM atau Indeks Pembangunan manusia hingga tahun 2007 hanya mencapai angka 64,43 % (BPS Nusa Tenggara Timur, 2009).

Sektor pertanian masih mendominasi sektor lapangan kerja yang terbesar di kabupaten Timor Tengah Selatan dan sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah bruto atau PDRB, dengan sumbangan mencapai Rp. 796.981.010 pada tahun 2007.

Menurut data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, sampai dengan Juni 2009, tercatat sekitar 906 jiwa penduduk Timor Tengah Selatan tercatat sebagai pencari kerja, dengan rincian 556 (pria) dan 350 (perempuan). Angka ini bisa saja meningkat karena menurut data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terjadi peningkatan jumlah pencari kerja / pengangguran yang tercatat, yaitu dari 4.237 jiwa pada tahun 2007 meningkat menjadi 4.620 jiwa pada tahun 2008, atau meningkat sekitar 383 jiwa. Jumlah angka pencari kerja yang besar ini menuntun kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai salah satu kabupaten termiskin di provinsi NTT (Disnakertrans Kabupaten TTS, 2009).

Selain jumlah angka pencari kerja yang besar, salah satu gambaran kemiskinan kabupaten Timor Tengah Selatan adalah jumlah rumah tangga miskin. Dalam sebuah data Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, tercatat sekitar 67.291 rumah tangga miskin berada di kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan persentase 60.02 %, atau sekitar 262.750 orang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2005 (BPS Nusa Tenggara Timur, 2009).

Sedangkan data lain menyebutkan bahwa, tercatat sekita 77.822 atau sekitar 18,5% dari total penduduk yang mencapai angka 425.895 jiwa. Jumlah ini meningkat sekitar 16.704 jiwa, dari tahun 2006 yang berjumlah total sekitar 61.118 jiwa¹. Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan salah satunya adalah tingkat kesehatan warga masyarakat, dan pengertian miskin dari BPS.

Selain data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemiskinan di Timor Tengah Selatan juga tergambar dalam jumlah rumah tangga miskin yang terdata di Dinas Sosial Provinsi NTT. Sekitar 13.754 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah jejak rekam data mengenai angka kemiskinan di kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengkategorisasian data RTSM ini diakui oleh Kepala Dinas Sosial didasarkan atas pengertian sangat miskin oleh BPS, dan BKKBN pusat.

Sempitnya lapangan pekerjaan menyebabkan kecenderungan penduduk untuk merantau atau bermigrasi cukup tinggi. Selain merantau ke Ibukota provinsi, banyak juga penduduk merantau keluar negeri untuk menjadi TKI. Angka tentang jumlah TKI sendiri dari tahun ke tahun juga meningkat, berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten TTS sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

¹ Data diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2007.

Tabel 6
Data Penempatan TKI tahun 1998-2009

Tahun	Jumlah TKI
1998	99
1999	40
2000	234
2001	317
2002	361
2003	331
2004	369
2005	329
2006	432
2007	246
2008	430
2009	646 ²

Sumber : Dinas Sosial dan Ketenagkerjaan dan Transmigrasi, 2009.

Dari data tersebut dapat tergambar bahwa memang ada *trend* penurunan angka jumlah TKI di sejumlah kurun waktu seperti 2002 ke 2003, 2004 ke 2005, 2006 ke 2007. Namun bila ingin menelisik lebih dalam, maka sesungguhnya angka tersebut mengalami peningkatan sejak pertama kali Kab TTS melakukan kegiatan migrasi atau pengiriman TKI pada tahun 1998.

Profil masyarakat kabupaten TTS merupakan cerminan dari kondisi penduduk desa Ajoabaki, Kecamatan Mollo Utara, yang menjadi lokasi penelitian. Untuk mencapai desa Ajoabaki, kita terlebih dahulu menuju kecamatan yang terletak sekitar 20 km dari ibukota Kabupaten, Kota Soe. Dari kota Soe, menumpang kendaraan umum yang biasa disebut "Oto" dengan biaya Rp. 5000,- sampai dengan Rp. 7000,-. Dalam satu setengah jam perjalanan, ibukota kecamatan dapat dicapai. Kondisi jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan buruk karena banyak sekali aspal yang sudah berlubang. Dari kota kecamatan Mollo Utara, Kapan, dengan menumpang ojek yang biasanya bertarif berkisar

² Data hingga Juli 2009

antara Rp. 5000,- sampai Rp. 7000,-, dengan waktu tempuh 1,5 jam untuk jarak 4 kilometer, desa Ajoabaki dapat dicapai.

Desa Ajoabaki memiliki 4 dusun, dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 1.766 orang atau 391 KK. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani (326 orang), lainnya adalah peternak (132 orang) dan TKI (53 orang). Jumlah Angkatan Kerja (18-56 tahun) di desa Ajoabaki sekitar 1.074 orang. Dari total angka tersebut ada sekitar 435 laki-laki, dan 437 perempuan dari usia 18-56 tahun yang sudah bekerja. Dari jumlah orang yang bekerja, hanya ada sekitar 326 yang bekerja tentu, dan 372 lainnya bekerja tidak tentu. Dan ada 106 penduduk (usia 18-56 tahun) yang tidak bekerja sama sekali.

Dari total luas lahan di lingkungan desa sebanyak 1579 ha, lahan perkebunan menjadi satu-satunya lahan yang dapat di garap sebagai lahan pertanian di desa Ajoabaki, luasnya mencapai 152 ha. Dengan mayoritas tanah kering sekitar 330 ha, tanpa ada lahan basah.

Dari sisi kepemilikan lahan, kebanyakan keluarga memiliki lahan seluas 1,0 – 5,0 ha (254 keluarga), 140 keluarga memiliki kurang dari 1,0 ha dan hanya 12 keluarga yang memiliki lahan dengan luas 5,0 -10 ha. Selain lahan, hampir setiap keluarga memiliki ternak babi atau sapi. Angka partisipasi sekolah di desa Ajoabaki adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Angka Partisipasi Sekolah Desa Ajoabaki

Tingkat Pendidikan	Sedang Sekolah	Tamat	Tidak Tamat
SD	382	298	88
SMP	41	82	24
SMA	48	75	1
Akademi	5	4	
Kursus	36		
Perguruan Tinggi	22	22	

Sumber: (Profil Desa Ajoabaki 2009)

Merujuk kepada pengertian keluarga sejahtera dari 391 KKBN, maka ada sekitar 259 keluarga di desa Ajoabaki masih tergolong Keluarga Prasejahtera atau keluarga yang sangat perlu dibantu, 90 Keluarga Sejahtera 1, 40 Keluarga Sejahtera 2, 40 Keluarga Sejahtera 3, dan sekitar 29 keluarga sejahtera 3 plus (Profil Desa Ajoabaki 2009, 2009).

Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Lombok Timur dengan Selong sebagai ibukota berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, samudera Indonesia di sebelah Selatan, selat Alas di sebelah Timur dan kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah di sebelah Barat.

Dari Mataram, ibukota NTB, kabupaten Lombok Timur bisa dicapai melalui jalan darat sejauh 52 km dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi dalam waktu 2 jam. Transportasi umum yang ada adalah bis mini (elf) dengan waktu tempuh yang lebih panjang, dapat mencapai 5 jam. Alternatif lain adalah naik taksi dengan biaya sekitar Rp.250,000.

Penduduk asli Lombok Timur adalah suku Sasak yang mayoritas beragama Islam. Selain suku Sasak, etnis lain yang tinggal di Lombok Timur adalah Jawa dan Cina.

Mata pencaharian dan kehidupan ekonomi penduduk Lombok Timur banyak bergantung pada sektor pertanian. Hal ini jelas terlihat dari 53,52% penduduk Lombok Timur yang bekerja di bidang pertanian. Persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja di bidang pertanian ini tidak jauh berbeda. Persentase laki-laki yang bekerja di bidang pertanian sebesar 54,22% dan perempuan yang bekerja di bidang pertanian sebesar 52,83% dari jumlah perempuan yang bekerja menurut lapangan usaha. Jenis pekerjaan lain yang dilakukan masyarakat adalah perdagangan dan migrasi.

Berdasarkan data tahun 2007, dari sebanyak 1.056.312 penduduk di kabupaten Lombok Timur, sebanyak 42,79% adalah penduduk laki-laki berusia diatas 15 tahun dan 57,21% adalah penduduk perempuan berusia diatas 15 tahun. Tingkat pengangguran di kabupaten Lombok Timur hanya mencapai 5,02% dari total penduduk di Lombok Timur. Jika dibandingkan, tingkat pengangguran penduduk laki-laki yang berusia diatas 15 tahun adalah sebesar 5,50% dan tingkat pengangguran penduduk perempuan yang berusia diatas 15 tahun lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat pengangguran penduduk laki-laki, yaitu hanya sebesar 4,54%.

Mengenai kemiskinan di kabupaten Lombok Timur, data menunjukkan bahwa selalu terjadi penurunan kemiskinan sejak tahun 2001, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Jumlah Penduduk Miskin di Lombok Timur tahun 2001 – 2008

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2001	386.155
2002	310.471
2003	278.513
2004	274.128
2005	269.585
2008	266.850

Sumber: (BPS Nusa Tenggara Barat, 2008)

Meskipun cenderung turun tetapi angka kemiskinan sampai pada tahun 2008, masih lebih dari 20% dari total penduduk di Lombok Timur, yaitu sebesar 266.850 penduduk.

Untuk migrasi, angka migrasi ke luar negeri di Lombok Timur merupakan terbesar kedua di Nusa Tenggara Barat setelah Lombok Tengah. Lebih dari 28% migran di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dari tahun 2004 sampai tahun 2008 berasal dari kabupaten Lombok Timur. Berikut data jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dan tahun keberangkatan:

Tabel 9
Jumlah TKI Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah laki-laki+ perempuan
2004	4.697	105	4.802
2005	12.401	330	12.731
2006	10.622	1.141	11.763
2007	10.364	2.406	12.770
2008	13.009	3.202	16.211

Total	51.093	7184	58,277
--------------	--------	------	--------

Sumber: BP3TKI NTB

Mayoritas para migran berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan jumlah yang cukup jauh dengan migran perempuan. Tetapi tabel di atas juga memperlihatkan bahwa migran perempuan terus meningkat dalam jumlah yang signifikan. Lonjakan jumlah migran perempuan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai lebih dari 300%.

Selain ke luar negeri, penduduk juga melakukan migrasi internal, sebagian besar dilakukan oleh laki-laki dengan daerah tujuan pulau Sumatera (terutama Riau dan Lampung) untuk bekerja di perkebunan sebagai buruh kelapa sawit, pulau Bali untuk bekerja menjadi buruh bangunan, dan pulau Kalimantan (Kalimantan Barat), sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Dari Kalimantan tidak jarang mereka akan menyebrang ke Malaysia Timur secara ilegal untuk bekerja menjadi buruh kelapa sawit di sana.

Desa lokasi penelitian, yaitu Pengadangan dapat dicapai dari Selong dengan angkutan umum yang sangat jarang frekuensi beroperasinya, atau naik ojek dengan jarak sepanjang 12 km dengan biaya Rp.15,000-Rp.20,000. Desa Pengadangan merupakan desa terluas dari tiga desa lainnya di kecamatan Pringgasela. Terletak di sebelah utara kota Selong, kota Kabupaten Lombok Timur, dengan jarak sekitar 11 kilometer, dan jarak dari Kecamatan adalah 2 kilometer. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, sebelah selatan berbatasan dengan desa Pringgasela kecamatan Aikmel, sebelah timur berbatasan dengan desa Lenek Daya kecamatan Aikmel, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Jurit, kecamatan Pringgasela. Desa berpenduduk 14.417 atau 3.862 KK, dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 7271 orang atau 50,4%, dan penduduk laki-laki sebanyak 7146 orang atau 49,6%, ini dibagi menjadi dari 6 dusun dan 63 Dasan/RT.

Desa ini memiliki bentang alam berupa dataran tinggi dengan ketinggian 400-900 meter di atas permukaan laut, berada tepat di kaki gunung Rinjani dengan suhu udara 23-29° Celcius, dan curah hujan sebanyak 1229 mm/tahun. Luas wilayah desa Pengadangan sebesar 9.674 Ha, namun, luas lahan sebagian besar merupakan lahan kering, yaitu 1.323.450 Ha, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk lahan sawah, yaitu hanya 652 Ha. Lahan sawah pun hanya digunakan ketika musim hujan saja, dengan sistem sawah tadah hujan.

Dari sisi kepemilikan lahan, 2090 KK memiliki tanah garapan di atas 10 are. Sebanyak 1.772 KK adalah buruh tani tanpa lahan. Mata pencaharian utama penduduk desa adalah bertani dan berburuh serta bermigrasi ke luar provinsi atau ke luar negeri sebagai TKI dengan negara tujuan utama Malaysia dan Arab Saudi. Selain bertani, 27% KK juga beternak sapi dengan rata-rata kepemilikan 2 ekor sapi.

Dalam hal pendidikan, mayoritas warga mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD, bahkan jumlah warga tidak tamat SD dan jumlah warga buta huruf berada di urutan kedua dan ketiga terbesar. Sedangkan untuk pendidikan tinggi masih sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan warga desa Pengadangan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini:

Tabel 10
Jumlah Penduduk Desa Pengadangan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008

Pendidikan	Jumlah
Tamat Perguruan Tinggi S1/ S2	96
Tamat Akademi D1/D2/D3	36
Tamat SMA/ Sederajat	576
Tamat SMP/ sederajat	1805
Tamat SD/MI	8764
Tidak tamat SD	2017
Taman kanak-kanak	239
Buta Huruf	1102

Sumber: (Profil Desa Pengadangan 2008)

Di desa Pengadangan NTB dalam kurun 10 tahun jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan dari setiap tingkat pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun terjadi penurunan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan pada tahun 2007. Jumlah penurunan siswa paling signifikan, yaitu siswa perempuan di tingkat SLTP. Sedangkan untuk tingkat SLTA, terjadi peningkatan jumlah siswa laki-laki dan perempuan secara signifikan

pada tahun 2007. Hal ini terkait dengan akses sarana pendidikan yang ada di desa. Sekolah lanjutan tingkat atas, mulai berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Sebelum ada sarana pendidikan tingkat SLTA di desa, warga desa harus pergi ke SLTA yang terletak di kota kabupaten.

Biaya transportasi yang harus dikeluarkan dan faktor jarak merupakan salah satu alasan mengapa hanya warga desa dengan tingkat ekonomi tertentu saja yang dapat mengenyam pendidikan tingkat SLTA. Pada tahun 2003 jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan SMA hanya 44 penduduk, karena pada saat itu fasilitas pendidikan tingkat sekolah atas belum ada di desa Pengadangan, dan jumlah ini meningkat lebih dari empat kali lipat pada tahun 2007, yaitu sebesar 176 penduduk, karena telah tersedia fasilitas pendidikan di desa. Tahun 2008, jumlah penduduk yang menamatkan sekolah menengah atas dari sekolah menengah atas yang ada di desa Pengadangan adalah sebanyak 275 penduduk. Hal ini memperlihatkan bahwa akses terhadap sarana pendidikan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap tingkat pendidikan yang dikenyam oleh warga desa.

Mengenai angka putus sekolah, sejak dahulu sampai saat ini masih ada murid yang mengalami putus sekolah, namun dengan jumlah yang semakin kecil kecil. Umumnya penyebab putus sekolah adalah karena faktor tingkat ekonomi keluarga yang rendah, sehingga siswa harus membantu ekonomi keluarga dengan membantu orang tua bekerja menjadi buruh, selain itu pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab putus sekolah. Umumnya mereka merupakan siswi kelas 2 SMP dan kelas 2 SMA yang menikah dengan mantan migran. Iming-iming keberhasilan yang diraih oleh mantan migran inilah yang menjadi alasan mereka lebih memilih untuk meninggalkan dunia pendidikan. Namun saat ini angka putus sekolah semakin kecil, karena tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sudah semakin meningkat, dan semakin meningkatnya pendapatan penduduk setempat karena banyak yang menjadi migran. Umumnya putus sekolah dialami oleh para siswi. Beberapa sekolah menyebutkan hanya terdapat 2 sampai 15 siswa putus sekolah setiap tahunnya dan terbanyak adalah di tingkat sekolah dasar.

Masyarakat Desa dan Ragam Sumber Penghidupan

Pertanian

Dari sisi mata pencaharian, sektor pertanian masih tetap dominan di kedua desa penelitian. Selain bertani padi, jagung, ubikayu, kacang tanah dan kedelai penduduk juga berkebun sayuran, tembakau dan buah-buahan untuk konsumsi sendiri maupun untuk diperdagangkan.

Di desa Ajoabaki, NTT penduduk bertani di lahan kering yang mengandalkan curah hujan. Kebanyakan penduduk desa melakukan kegiatan berkebun atau yang biasa mereka sebut *bertofa*. Kegiatan *bertofa* biasanya dilakukan dari pagi sekitar pukul 05.30/06.00 WITA atau sampai dengan pukul 15.00/16.30 WITA. Biasanya kegiatan berkebun ini dilakukan oleh satu keluarga yang memiliki lahan perkebunan. Seluruh keluarga mulai dari bapak, ibu, dan anak, semua bekerja mengolah kebun keluarga. Hasil kebun, kebanyakan digunakan untuk konsumsi rumah tangga, dan jarang sekali dijual ke pasar. Hampir di setiap rumah tangga melakukan kegiatan berkebun, karena lahan kebun dan lahan pertanian kering adalah sumberdaya yang dapat diandalkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dari komposisi kepemilikan lahan, 63% rumah tangga desa memiliki lahan seluas 1,0 – 5,0 ha, 34% memiliki lahan kurang dari 1,0 ha dan hanya 0.03% rumah tangga yang memiliki lahan seluas 5,0 -10 ha.

Selain bertani, penduduk juga beternak dan ternak yang dipelihara adalah babi dan sapi. Bagi masyarakat NTT, pemilikan lahan dan ternak serta rumah bagi warga desa adalah indikator kemiskinan. Semua rumah tangga yang tidak memiliki lahan dan ternak serta rumah dikategorikan sebagai rumah tangga miskin, dan yang memiliki ketiganya tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin³. Pada pengertian lokal tentang miskin, keberadaan ternak dan lahan untuk berkebun atau tempat tinggal, menjadi sangat penting. Karena lahan dan khususnya ternak, adalah harta yang dapat digunakan atau di jual jika berada dalam masa kesusahan. Pengertian dan kriteria rumah tangga miskin menurut warga lokal berbeda dengan pengertian dan kriteria pemerintah. BPS misalnya dalam melakukan kegiatan surveynya berpegangan pada pengertian kemiskinan yang merujuk

³ Bandingkan dengan indikator kemiskinan pemerintah yang menggunakan kondisi rumah sebagai penentu kemiskinan.

kepada kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan makan ataupun kebutuhan bukan makan, didasari atas pengeluarannya. Kebutuhan makan antara lain, kebutuhan untuk membeli beras, air minum, dan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan kebutuhan bukan makan, adalah kebutuhan akan tempat tinggal, pendidikan, dan rekreasi (BPS, 2006). Sedangkan BKKBN menggunakan indikator kondisi tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik untuk menentukan tingkat kesejahteraan (baca: kemiskinan). Di desa Pengadangan NTB, berdasarkan kriteria lokal, mayoritas rumah tangga desa penelitian di NTB berdasarkan kriteria kemiskinan setempat masuk dalam golongan orang miskin karena lebih dari 95% rumah tangga tidak memiliki lahan untuk bertani dan berkebun. Berdasarkan kriteria pemerintah, jumlah orang miskin adalah 10% dari jumlah penduduk.

Di desa Pengadangan, NTB, mata pencaharian dominan penduduk desa adalah petani dan buruh tani, serta peternak. Pertanian warga mengandalkan lahan kering untuk berkebun dan lahan sawah pun hanya digunakan ketika musim hujan saja, dengan sistem sawah tadah hujan. Jenis komoditas pertanian adalah padi dan palawija, dengan jenis tanaman palawija di dominasi oleh tanaman jagung, kacang tanah, kedelai, dan cabai, serta tembakau Virginia. Selain menanam padi petani juga menanam sayuran, seperti cabe rawit, tomat, dan jagung. Untuk peternakan, jenis ternak terbanyak adalah sapi, itik dan domba.

Tingkat pendidikan yang rendah dan dominasi sektor pertanian sebagai sumber penghidupan penduduk menjadi indikator utama tingkat kemiskinan warga. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan pekerjaan musiman dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp. 150,000-Rp. 200,000. Penghasilan ini setara dengan penghasilan sebagai buruh industri kecil batu bata dan pemecah batu di NTB atau bekerja menenun kain di NTT, yang juga bersifat musiman. Apabila dibandingkan dengan upah minimum, penghasilan tersebut hanya 20% sampai 25% dari upah minimum regional NTT dan NTB yang besarnya masing-masing Rp. 725,000 dan Rp. 832,500 per bulan untuk tahun 2009. Tingkat penghasilan yang rendah merupakan alasan utama warga desa untuk bermigrasi keluar desa dengan bekerja ke Bali, Jawa, Kalimantan dan keluar negeri seperti Malaysia dan Saudi Arabia. Bekerja di luar negeri sebagai TKI mendapatkan upah antara Rp.1,500,000 hingga Rp.2,000,000 untuk perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan Rp.1,600,000 – Rp.2,200,000 untuk lelaki buruh kebun.

Hal penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah cara hidup masyarakat desa yang masih mengandalkan pemenuhan kebutuhan dari hasil kebun sendiri dan semangat serta

praktek tolong-menolong yang masih tinggi. Di desa NTB maupun NTT, kebutuhan makan sehari-hari seperti sayuran, minyak goreng, dan sumber protein hewani dipenuhi sendiri dan tidak dibeli. Solidaritas antar warga juga masih tinggi. Tetangga dapat meminta makanan kepada tetangga yang memiliki makanan, dengan senang hati tetangga yang memiliki makanan akan selalu memberikan sebagian makanannya untuk sang tetangga tersebut. Mereka juga akan segera tahu bila ada tetangganya yang tidak mampu membeli makan. Biasanya, kaum perempuan akan saling berkunjung ke rumah tetangga lainnya dan mengobrol di teras rumah tetangga lainnya dan melalui forum tersebut terjadi pertukaran informasi mengenai keadaan para tetangga yang sedang kekurangan sehingga tetangga yang ingin membantu dapat dengan mudah melakukannya.

Ragam Sumber Pendapatan Non-Pertanian

Di desa Pengadangan NTB keragaman pekerjaan nonpertanian lebih banyak dibandingkan di desa Ajoabaki NTT. Sebagai pekerjaan musiman, pertanian/perkebunan tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Di kedua desa selain bertani sumber penghidupan yang diandalkan warga adalah bermigrasi baik ke luar pulau maupun ke luar negeri. Sumber penghidupan lain di Pengadangan NTB bagi mereka yang tidak bermigrasi adalah berburuh di kebun tembakau atau sayuran dan di industri batubata dan genteng serta menjadi buruh pemecah batu. Diversifikasi sumber mata pencaharian di desa Pengadangan NTB mulai ada sejak sekitar tahun 1995. Sebuah perusahaan rokok mengadakan penyuluhan mengenai penanaman tembakau Virginia. Tembakau jenis ini merupakan jenis tembakau yang digunakan untuk rokok nasional maupun Internasional. Sebelum mengenal tembakau Virginia, masyarakat hanya menanam tembakau Rajang, yang dikonsumsi secara lokal oleh masyarakat Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur. Sejak itu lah, masyarakat mulai menanam tembakau Virginia.

Pada tahun 2000 di Pengadangan mulai tumbuh industri-industri berskala kecil, yang merupakan imbas dari desa-desa tetangga, terbatasnya lahan pertanian, serta merupakan hasil informasi dan pelatihan-pelatihan dari Balai Latihan Kerja yang diadakan oleh Departemen Perindustrian. Beberapa industri yang ada di desa Pengadangan adalah industri genteng, industri batu bata, industri tambang batu, dan usaha mebel kayu. Industri genteng yang ada di desa pengadangan mulai ada sejak tahun 2000-an. Namun banyak Industri genteng gulung tikar karena kalah bersaing dengan industri genteng jenis lain. Sampai saat ini hanya terdapat beberapa industri genteng yang masih berjalan. Dalam satu industri genteng, membutuhkan buruh sekitar 10 orang.

Industri batu bata di desa Pengadangan baru berjalan sekitar empat sampai lima tahun lalu atau pada tahun 2004. Pada awalnya hanya terdapat di desa sebelah, yaitu desa Lenek. Ternyata, bahan dasar untuk membuat bata di desa Lenek harus didatangkan dari luar, dan secara kebetulan, bahan dasar yang dibutuhkan untuk membuat bata, tersedia di desa Pengadangan. Hasil bata desa Pengadangan pun lebih baik dibandingkan dengan hasil bata desa Lenek. Sejak itulah mulai tumbuh industri bata di desa Pengadangan. Sampai saat ini terdapat 30 gudang batu bata di desa Pengadangan, yang dapat mempekerjakan lebih dari 300 warga desa.

Selain itu, industri mebel kayu juga terdapat di desa Pengadangan. Industri ini diawali oleh beberapa warga yang bekerja sebagai tukang kayu, dan sedang tidak memiliki pekerjaan, mencoba untuk membuat mebel kayu, kemudian pemerintah membuat pelatihan untuk industri kecil mebel kayu. Sejak itulah industri mebel kayu mulai berjalan di desa Pengadangan, sampai saat ini, namun industri ini tidak begitu besar karena hanya dijalankan oleh beberapa pekerja saja.

Munculnya sumber-sumber penghidupan lain membawa pengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diterima oleh warga. Sekitar tahun 1990, pendapatan yang diterima oleh para buruh adalah Rp 3.000,- sampai Rp4.000,- per hari. Dalam satu bulan, pendapatan buruh tani sekitar Rp100.000,-. Saat ini, pendapatan yang diterima oleh buruh tani sedikit meningkat jika dilihat hanya dari segi nilai nominal. Dalam satu hari, pendapatan yang diterima berkisar antara Rp10.000,- sampai Rp25.000,-, tergantung dengan hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan hari itu. Sistem pengupahan di industri bata menggunakan sistem borongan dimana buruh akan menerima upah ketika mereka menyelesaikan seribu buah bata yang telah kering. Upah buruh bata adalah Rp50.000,- per seribu bata. Umumnya buruh bata dapat menyelesaikan seribu bata dalam waktu satu minggu. Dalam satu bulan, penghasilan buruh bata berkisar antara Rp150.000,- sampai Rp200.000,-.

Seperti berlaku umum, ada kesenjangan upah antara upah laki-laki dan upah perempuan. Jumlah upah yang diterima laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah upah yang diterima oleh perempuan. Sebagai perbandingan, saat ini di desa Pengadangan, upah buruh tembakau laki-laki per hari adalah Rp30.000,-, sedangkan upah buruh tembakau perempuan hanya Rp20.000,- per hari. Hal ini terkait dengan hasil kerja, bahwa hasil kerja yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan hasil kerja perempuan dengan rentang waktu yang sama.

Di desa NTT sumber penghidupan lain di luar pertanian selain migrasi hampir tak ada kecuali menenun kain dan sebagian kecil membuka warung. Pendapatan dari menenun kain sangat tergantung pada pesanan dan situasi pasar. Harga satu selendang biasanya dijual dengan kisaran harga Rp. 250.000- sampai Rp. 500.000,-, atau menenun selimut dengan kisaran harga Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000,-. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat selendang biasanya sampai satu bulan, sedangkan untuk selimut bisa sampai dua atau tiga bulan, Penduduk, pada umumnya perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang mendapat upah Rp.50,000 – Rp.300,000 per bulan.

Masuknya Puskud ke desa Ajoabaki pada sekitar tahun 2000-an, juga mengubah sebagian mata pencaharian atau pekerjaan penduduk desa. Jika dahulu penduduk hanya dapat bekerja sebagai petani kebun, pada saat ini sudah banyak penduduk desa yang bekerja sebagai peternak. Masuknya Puskud, juga mengubah orientasi jenis tanaman yang ditanam di kebun. Bila dahulu hanya berfokus pada tanaman jagung, pada saat ini tanaman yang ditanam mulai beragam, mulai dari tanaman untuk pakan ternak hingga buah-buahan.

Kultur dan Relasi Sosial

Mayoritas penduduk desa lokasi penelitian di NTB beragama Islam sedangkan warga desa penelitian di NTT beragama Kristen. Konsisten dengan hal itu, tokoh masyarakat di NTB yang dihormati adalah tuan guru yakni ulama atau pemuka agama Islam. Tuan guru merupakan tokoh masyarakat, yang lebih dihormati oleh warga desa dibandingkan dengan kepala desa atau kepala dusun. Warga yang ingin menjadi migran ke negara lain selalu meminta izin dan pamit kepada tuan guru. Tidak hanya itu saja, keputusan yang akan diambil/ rencana-rencana program, oleh kepala desa, yang berkaitan dengan masyarakat pun biasanya selalu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tuan guru sebelum program/rencana tersebut dijalankan. Di desa NTT masyarakat menempatkan pendeta sebagai tokoh masyarakat dengan fungsi yang serupa dengan tuan guru di lingkungan masyarakat muslim di desa NTB. Perbedaan agama ternyata tidak mempengaruhi peran dan relasi gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara kultural masyarakat NTT dan NTB adalah masyarakat yang patriarkis dengan suami sebagai kepala rumah tangga dengan tanggungjawab utama suami. Di NTT perempuan berperan sebagai pelaksana rumah tangga dan membantu pekerjaan di kebun. Di NTB adat suku Sasak melarang perempuan meninggalkan rumah. Adalah aib bagi sebuah keluarga apabila seorang suami membiarkan istrinya bekerja di luar rumah mencari uang, apalagi jika

sampai merantau ke tempat jauh. Akan tetapi pembagian peran gender semacam itu terus mengalami pergeseran dengan aktivitas ekonomi perempuan terutama karena migrasi. Semakin banyak perempuan dari desa NTT dan NTB yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, atau menjadi buruh pabrik di Jakarta dan sekitarnya.

Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik

Sentuhan program pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan public bagi masyarakat desa khususnya untuk sarana jalan, pendidikan, sanitasi dan kesehatan terlihat nyata di kedua desa.

Di desa Ajoabaki NTT dalam kurun sepuluh tahun mengalami banyak perubahan terutama dari segi infrastruktur. Sepuluh tahun lalu listrik belum ada dan untuk penerangan rumah tangga juga jalan, hanya pelita dengan⁴-lah minyak tanah yang diandalkan sebagai sumber cahaya. Tata letak rumah juga tidak seperti saat ini yang menghadap ke jalan raya, melainkan hampir semua rumah menghadap ke belakang, atau ke arah kebun. Tumbuhan yang sekarang tumbuh di pinggir jalan sama sekali belum tampak, dan pemandangan yang dapat dilihat di desa Ajoabaki pada tahun 1990-an hanyalah jalanan kering yang berdebu. Pada masa itu akses kedesa lain maupun menuju desa Ajoabaki sangat sulit karena harus melewati hutan yang dipenuhi dengan tumbuhan liar dan tinggi-tinggi. Selain itu, hasil perkebunan juga tidak dapat diandalkan, hanya ada tanaman jagung. Baru pada sekitar awal tahun 2000, listrik sudah mulai masuk, dan beberapa tata letak rumah dengan arahan bapak desa mulai menghadap jalan raya. Selain itu, Kepala Desa Ajoabaki juga menyarankan para pemilik rumah untuk menanam tumbuh-tumbuhan di depan rumahnya, guna mempercantik pemandangan desa.

Berkenaan dengan kualitas kesehatan selama sepuluh tahun terakhir, desa Ajoabaki juga mengalami banyak perubahan. Warga desa pada tahun 1990-an tidak satupun yang memiliki wc. Banyak warga masyarakat memanfaatkan sumber air yang sangat jauh untuk buang air atau melakukannya di kebun belakang rumah. Namun pada saat ini, sudah banyak rumah yang memiliki wc. Selain wc, jendela atau ventilasi juga baru hadir di rumah-rumah penduduk desa setelah bapak desa memberikan pengarahan tentang kondisi rumah yang baik untuk memperbaiki aliran udara. Kurangnya jendela dalam rumah menyebabkan pada

⁴ Sumber penerangan warga masyarakat desa dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah, sampai saat ini masih ada warga yang menggunakan Pelita sebagai sumber pencahayaanya, karena tidak memiliki akses terhadap listrik.

kurun waktu itu banyak penduduk yang terkena penyakit ISPA⁵. Namun sampai sekarang, keterbatasan atau kekurangan akses atas air bersih masih menjadi masalah terbesar desa, sehingga sering muncul kasus diare di desa. Hingga saat ini penduduk desa Ajoabaki harus menempuh perjalanan sejauh 20 km setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Kesulitan air bersih menyebabkan juga warga kurang minum air.

Perubahan yang paling nyata terlihat dari segi kesehatan, adalah kehadiran Polindes (Poliklinik desa). Polindes sendiri dibangun sejak desa Ajoabaki menerima bantuan PNPM dari pemerintah pada pertengahan tahun 2008. Namun Polindes ini kemudian kondisi bangunan dan fasilitasnya terbengkalai karena tidak ada bidan yang mau tinggal di Polindes terutama karena kondisi jalan yang tidak bagus, sehingga polindes tidak berfungsi .

Di desa Pengadangan NTB fasilitas sekolah dasar merupakan fasilitas pendidikan yang paling banyak, yaitu 10 sekolah, sedangkan untuk tingkat lanjutan pertama, hanya terdapat 3 sekolah, dan untuk tingkat SLTA hanya terdapat satu sekolah, yaitu Madrasah Aliyah. Satu-satunya Sekolah Menengah Atas yang berada di desa Pengadangan baru berdiri sejak 4-5 tahun lalu, dan setiap tahunnya, pihak sekolah hanya mampu menerima siswa baru sekitar 180 siswa. Belum dikurangi dengan siswa tinggal kelas, siswa putus sekolah, dan siswa tidak lulus. Sebelum Madrasah Aliyah ini didirikan di desa Pengadangan, warga yang ingin melanjutkan sekolah biasanya bersekolah di desa sebelah, desa Rempung, Pringgasele, atau Masbagik. Warga yang melanjutkan pendidikan setelah SMA biasanya ke kota Kabupaten, atau ibukota propinsi, di Mataram. Pada umumnya, orang-orang yang melanjutkan pendidikan sampai pada tingkat universitas adalah mereka yang memiliki status sosial menengah ke atas, seperti yang memiliki kedudukan di masyarakat, yakni kepala RW, atau mereka yang memiliki lahan pertanian sendiri.

Mengenai akses kesehatan, terdapat 2 Pondok bersalin Desa (Polindes), sebuah Puskesmas pembantu, dan 2 Posyandu. Sampai saat ini, posyandu masih berfungsi dengan baik. Setiap bulan selalu ada kegiatan untuk ibu hamil dan balita yang diumumkan di setiap masjid oleh para kader Posyandu. Sedangkan untuk tenaga medis, hanya terdapat seorang paramedis yang bekerja di Puskesmas pembantu, 2 orang Bidan, dan 4 orang dukun bersalin. Saat ini kesadaran masyarakat desa Pengadangan akan kesehatan sudah jauh lebih meningkat.

⁵ Sampai sekarang berdasarkan wawancara dengan kepala Puskesmas Kecamatan Kecamatan Mollo Utara, ISPA masih menduduki peringkat pertama penyakit yang sering di derita penduduk kecamatan Mollo Utara, tercatat sekitar 746 kasus.

Warga desa Pengadangan sudah menyadari mengenai pentingnya kesehatan. Hal ini tidak lepas dari peran kader-kader yang giat mensosialisasikan mengenai pentingnya kesehatan kepada masyarakat. Beberapa belas tahun lalu, masyarakat yang sakit tidak mengakses layanan kesehatan yang ada di desa, warga lebih percaya dengan pengobatan tradisional yang diberikan oleh dukun dibandingkan tenaga medis. Ketidaktahuan pengetahuan warga mengenai kesehatan dan layanan kesehatan, membuat mereka masih belum percaya dan takut mengakses layanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Mereka mengakses layanan kesehatan ketika sakit yang mereka rasakan sudah parah. Pertolongan yang mereka dapatkan pun sering terlambat, dan pasien sudah tidak dapat tertolong lagi. Saat ini, animo masyarakat untuk berobat ketika mereka merasakan sakit cukup tinggi. Warga akan langsung mengakses layanan kesehatan ketika mereka merasa tidak sehat.

Perubahan lainnya mengenai layanan kesehatan yaitu sejak keberadaan Pondok Bersalin Desa (Polindes) pada tahun 1996. Sebelum keberadaan Polindes, warga selalu meminta bantuan dari dukun beranak yang ada di desa Pengadangan. Walaupun beberapa dukun beranak yang ada di desa Pengadangan sudah terlatih untuk membantu proses persalinan, namun tidak semua persalinan berhasil ditangani oleh dukun beranak, karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan alat-alat untuk membantu persalinan yang dimiliki oleh dukun beranak. Sebelumnya warga lebih memilih untuk melahirkan di dukun, karena tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap kemampuan dukun, akses terhadap bidan masih terbatas, serta keterbatasan ekonomi masyarakat, membuat warga desa lebih memilih untuk menjalani persalinan di dukun beranak dibandingkan rumah sakit. Setelah keberadaan Polindes, dukun beranak tidak lagi membantu proses persalinan. Dukun beranak justru menjadi mitra bidan untuk mengantar warga desa yang akan menjalani proses persalinan ke Polindes, dan ikut membantu bidan dalam proses persalinan. Selain itu, biaya persalinan di bidan bersifat sukarela. Bidan tidak menetapkan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga pasien agar pasien tidak merasa terbebani ketika berobat ke bidan, dan lebih memilih untuk melakukan persalinan di bidan dibandingkan melakukan persalinan secara tradisional di dukun beranak.

Migrasi: Titik Perubahan Sosial-Ekonomi-Kultural Masyarakat NTT dan NTB

Migrasi, dalam hal ini migrasi keluar negeri, merupakan sebuah fenomena yang sangat penting yang mengubah kehidupan sosial, ekonomi dan kultural masyarakat. Migrasi ke luar negeri menjadi sumber penghidupan baru, menjadi cara untuk keluar dari kemiskinan dan keterbatasan kesempatan kerja, serta menjadi faktor pendorong perubahan sosial warga desa di NTT dan NTB, termasuk perubahan peran gender.

Tahun 1998-1999 Desa Ajoabaki adalah salah satu desa di TTS yang pertama kali melaksanakan program pengiriman TKI ke luar negeri. Sekitar tahun 1997 Kepala Desa Ajoabaki mengikuti kegiatan penataran di Malang tentang tata cara proses pengirimannya TKI, dan kembalinya dari Malang, beliau langsung mengabarkan kepada warga masyarakat tentang tata cara, serta keuntungan yang didapat kalau menjadi TKI. Pada awal pemberangkatannya terdapat 10 perempuan di desa ini berangkat menjadi TKI. Dua dari sepuluh perempuan tersebut sampai sekarang masih menjadi TKI.

Tidak ada data yang runut mengenai perkembangan jumlah TKI dari sepuluh tahun lalu sampai sekarang, namun dari data tahun 1998, dan data tahun 2009, terlihat peningkatan jumlah TKI. Jika tahun 1998 jumlah TKI dari desa Ajoabaki sebanyak 10 orang, tahun 2008 sebanyak 46 orang, maka jumlah TKI pada tahun 2009 meningkat menjadi sekitar 53 orang. Bahkan angka ini jauh lebih kecil dari kenyataannya karena banyak warga yang menjadi TKI tanpa mendaftar di kantor desa (ilegal). Iming-iming gaji besar dengan pekerjaan ringan biasanya sebagai PRT, atau pekerja kebun, yang tidak membutuhkan keterampilan dan tingkat pendidikan tinggi juga menjadi salah satu faktor terbesar pendorong penduduk desa untuk bermigrasi.

Di desa Pengadangan NTB, jumlah penduduk yang melakukan migrasi ke negara lain sejak 10 tahun yang lalu sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari salah satu LSM lokal di Lombok Timur, ADBMI, menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang berangkat migrasi dari tahun 1990-2004 sebanyak 123 penduduk. Dalam kurun waktu 14 tahun, rata-rata penduduk bermigrasi setiap tahunnya adalah 8 orang. Jumlah ini jauh kecil dibandingkan dengan jumlah keberangkatan penduduk desa yang bermigrasi pada tahun 2005 – 2008, yaitu sebanyak 934 penduduk. Dalam kurun waktu hanya 3 tahun, lebih dari 300 penduduk bermigrasi setiap tahunnya. Jumlah migran yang berasal dari desa

Pengadangan sampai saat ini adalah 1.057 orang. Mayoritas para migran adalah laki-laki, yaitu sebanyak 934 orang, sedangkan jumlah migran perempuan hanya sebanyak 123 orang. Negara tujuan migrasi adalah Malaysia dan pekerjaan yang dilakukan adalah pembantu rumah tangga untuk perempuan dan buruh perkebunan untuk laki-laki.

Selain karena alasan struktural, semakin meningkatnya jumlah migran dari desa Pengadangan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *tekong-tekong* ilegal dan PPTKIS (Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang beroperasi di kawasan Lombok Timur. Umumnya *tekong* atau calo ilegal adalah mantan migran yang telah mengetahui kondisi, keadaan, dan akses dengan pekerjaan di Malaysia, serta mengetahui cara-cara pergi ke Malaysia secara ilegal dengan aman, sehingga ia berani menjadi *tekong* yang membawa calon migran. Sejak tahun 2004, jumlah PPTKIS yang beroperasi terus meningkat. Pada tahun 2004, jumlah PPTKIS di Lombok Timur hanya 7 PPTKIS sedangkan pada tahun 2008, terdapat 24 PPTKIS. Di desa penelitian jumlah *tekong* sampai saat ini sekitar delapan orang. Mengenai jumlah buruh migran pada tahun 2004, jumlah migran yang berasal dari Lombok Timur sebanyak 6.278 orang dan tahun 2008 jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu sebanyak 15.931 orang.

Jumlah migran laki-laki selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah migran perempuan. Hal ini terkait dengan budaya dalam masyarakat Lombok, dahulu, ada larangan bagi perempuan untuk bekerja meninggalkan rumah. Laki-laki lah yang harus bekerja mencari nafkah. Namun budaya ini sudah mulai tak berlaku. Keberadaan PJTKI yang selalu menawarkan dan memprioritaskan perempuan untuk bekerja menjadi migran karena permintaan tenaga kerja bagi perempuan semakin meningkat, syarat yang mudah dipenuhi, serta tidak dibutuhkannya modal bermigrasi bagi perempuan, karena PJTKI menerapkan sistem potong gaji bagi perempuan yang telah ditempatkan di negara tujuan, berdampak pada peningkatan jumlah migran perempuan. Jumlah perempuan yang menjadi migran mulai meningkat sejak sekitar tahun 2000. Pada tahun 2004, jumlah migran perempuan hanya sebanyak 143 orang dan pada tahun 2008 jumlah ini meningkat lebih dari 20 kali lipat, yaitu sebanyak 3.013 orang. Meskipun demikian kebanyakan perempuan yang migran berstatus janda atau tidak berada dalam ikatan perkawinan sebab perempuan yang masih dalam ikatan tersebut tidak diijinkan migrasi karena pencari nafkah adalah laki-laki.

Bekerja di luar negeri jelas membawa dampak perbaikan kehidupan melalui upah yang diperoleh yang jumlahnya sepuluh kali lipat dibandingkan bekerja di kampung atau di dalam negeri. Meskipun mengalami pemotongan gaji dalam jumlah yang signifikan, rata-rata 6

bulan pertama gaji, akan tetapi tetap ada hasil yang dapat dikumpulkan dan dikirimkan ke desa.

Frekuensi mengirim/menitipkan uang hasil kerja adalah dalam hitungan bulan atau tahun. Dalam satu tahun, para migran hanya beberapa kali mengirim remitansi. Bahkan ada pula migran yang hanya mengirimkan remitansi beberapa kali dalam jangka waktu beberapa tahun. Besarnya remitansi yang dikirimkan tergantung oleh jenis pekerjaan, lamanya bekerja di negara tujuan, penghasilan migran, dan majikan tempat migran bekerja di negara tujuan. Data dari beberapa informan menyebutkan bahwa jumlah remitansi yang dikirim berkisar antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp8.000.000,-. Sedangkan data dari kantor desa menunjukkan rata-rata jumlah remitansi yang dikirim yaitu sebesar Rp4.000.000,- dengan kurun waktu antara 4 sampai 5 bulan.

Penggunaan uang hasil migrasi memiliki pola yang mirip di kedua desa. Ada 3 prioritas pengalokasian dana hasil bermigrasi ke luar negeri: (1) untuk memperbaiki atau membangun rumah, (2) untuk biaya pendidikan anak dan (3) untuk modal usaha. Kebanyakan dari keluarga migran di desa NTT menggunakannya untuk membenahi rumah, mengganti atap daunnya dengan seng, menutupi dinding dengan batu bata, dan melapisi lantainya dengan ubin keramik. Di desa NTB hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan membangun atau memperbaiki rumah sendiri atau rumah orangtua/kerabat, membeli alat-alat rumah, dan membeli barang-barang yang bersifat ekonomis, seperti televisi, motor dan mesin jahit.

Selain digunakan untuk membenahi bentuk rumah, biaya pendidikan anak-anak bagi mereka yang telah berkeluarga adalah hal yang juga dilakukan oleh keluarga migran. Membuka usaha sebagai salah satu upaya untuk bekerja di desa bila tidak pergi migrasi, membeli harta benda yang suatu saat dapat dijual kembali. Bagi warga desa NTT salah satunya adalah ternak. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ternak pada dasarnya adalah harta yang paling penting bagi warga masyarakat desa Ajoabaki karena ternak dapat dijual sewaktu-waktu bila ekonomi keluarga berada dalam keadaan terjepit. Bahkan dalam tata cara pembelian lahan perumahan atau kebun, ternak juga dapat digunakan sebagai alat tukar, selain uang kontan. Sapi dan babi, menjadi salah satu ternak primadona yang sering dibeli oleh penduduk desa Ajoabaki⁶. Remitan juga digunakan sebagai modal usaha misalnya

⁶ Bahkan kenyataannya, babi menjadi sangat penting, karena dapat digunakan atau bahkan wajib menjadi mas kawin penduduk desa khususnya bagi pengantin laki-laki.

membuka warung di desa NTT atau membeli dan menyewakan oven untuk pengeringan tembakau di desa NTB.

Keputusan menggunakan uang hasil kerja dilakukan oleh si migran dan keluarga menjalankan keputusan dari migran. Keputusan biasanya dibuat sebelum calon migran tersebut pergi, atau dengan memberikan perintah melalui surat yang dikirimkan dari negara tempatnya bekerja. Pada tingkat ini, posisi seseorang yang menjadi migran (baik perempuan atau laki-laki) sangat penting untuk memutuskan penggunaan dana hasil migran.

Arus migrasi ke luar negeri membawa dampak dalam aspek ekonomi dan sosial-kultural baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif meliputi perubahan bentuk bangunan fisik rumah warga menjadi rumah yang relatif lebih kokoh dan sehat. Di desa NTB dampak positif migrasi lainnya adalah diversifikasi jenis tanaman, yaitu tanaman buncis dan tomat. Sebelum mengenal migrasi, masyarakat memang sudah mengenal dan menanam tanaman ini, namun hanya untuk dikonsumsi sendiri karena harga di pasaran pun tidak begitu bagus. Tanaman buncis dan tomat mulai berorientasi pasar ketika ada salah satu mantan migran yang pernah bekerja di ladang di Malaysia, membawa bibit kedua tanaman ini dari Malaysia. Kualitas panen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan buncis dan tomat lokal, dan harga yang ditawarkan di pasar, cukup membantu ekonomi petani buncis dan tomat, membuat kedua tanaman ini menjadi berorientasi pasar. Harga di pasar pun menjadi lebih baik, sehingga banyak warga menanam tanaman ini. Migrasi juga membawa dampak semakin meningkatnya tingkat pendidikan yang dikenyam oleh warga desa pengadangan, karena remitansi juga digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Mengenai dampak negatif, secara umum menyangkut hubungan dalam rumah tangga dan peningkatan beban kerja perempuan. Adalah kasus umum bagi rumah tangga yang salah satu istri atau suami berangkat pergi muncul persoalan rumah tangga: perceraian, perselingkuhan, hamil di luar nikah, pertengkaran suami istri. Dari sisi pembagian kerja, beban yang ditanggung oleh istri ketika sang suami bermigrasi, menjadi lebih besar, karena harus bekerja untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarga, karena remitansi tidak dikirim tidak rutin setiap bulan, sehingga istri harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain harus tetap mengasuh anak. Dalam hal istri yang berangkat bekerja keluar negeri, soal pengasuhan anak diserahkan kepada nenek, dan suami tetap menjalankan fungsi mencari nafkah. Bukti anekdotal menunjukkan penyalahgunaan uang yang dikirimkan istri, oleh suami yang digunakan untuk berjudi.

Dampak negatif semacam itu telah mendorong bapak kepala desa di NTT mengeluarkan kebijakan untuk calon migran yang telah berkeluarga untuk tidak berangkat ke luar negeri agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Alhasil dari peraturan inilah, justru kemudian banyak mendorong penduduk desa untuk melakukan banyak pelanggaran diantaranya dengan pemalsuan identitas, atau "pergi diam-diam" tanpa melapor ke kantor desa dan pergi sebagai warga dari desa lain.

Jumlah perempuan yang pergi bekerja ke luar negeri yang semakin meningkat membuktikan terjadinya perubahan peran gender. Larangan bagi perempuan untuk berkegiatan di arena publik tidak lagi berlaku, bahkan dari sisi kontribusi ekonomi perempuan yang bekerja di luar negeri justru menjadi pencari nafkah utama karena besarnya uang yang dibawa ke dalam rumah tangga. Semakin terbukanya peluang kerja di luar negeri bagi perempuan juga membawa implikasi pada kepercayaan diri perempuan. Kesempatan untuk bekerja di luar negeri bagi perempuan juga membawa pengaruh terhadap penampilan mereka. Terlihat ada perbedaan antara perempuan migran dengan perempuan bukan migran yang cukup jelas pada perubahan sikap dan penampilan.

Di NTB misalnya, perempuan mantan migran lebih berani berbicara dengan orang baru, sedangkan perempuan yang bukan migran, biasanya kurang berani berbicara dengan orang baru. Begitu pula dalam hal berdiskusi dengan orang lain atau di kantor desa. Perempuan mantan migran lebih banyak mengeluarkan pendapatnya dibandingkan dengan perempuan bukan migran yang cenderung pasif. Perempuan mantan migran biasanya sudah fasih berbicara dengan bahasa Indonesia. Jika mereka mantan migran dari Malaysia, mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan logat melayu. Sedangkan perempuan bukan migran tidak lancar atau bahkan tidak dapat berbicara dengan bahasa Indonesia.

Dalam soal cara berpakaian, perempuan mantan migran tidak lagi mengenakan kain sebagaimana perempuan bukan migran, melainkan mengenakan celana panjang dalam keseharian. Masih berkaitan dengan pakaian, perempuan yang tidak migran/ perempuan yang belum pernah migrasi, membeli baju hanya 1 tahun sekali, yaitu pada saat lebaran tiba. Namun perempuan mantan migran menjadi lebih sering membeli baju dengan penghasilan yang diperolehnya dan mempunyai pos untuk membeli baju yang tidak dilakukan sebelum menjadi buruh migran.

Kotak 1 Profil Buruh Migran Perempuan

Ibu Ni 35 tahun, adalah salah satu anak dari Ibu Salmiah yang bermigrasi sejak ia berstatus janda, pada tahun 1999. Dua tahun sebelum Ibu Sukarni bermigrasi, tahun 1997, merupakan zaman sulit, karena beratnya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya hanya dari hasil berburuh tani. Ibu Ni hanya tamat SD dan menikah pada usia 15 tahun. Karena belum kuatnya pondasi ekonomi pasangan itu ketika menikah, mereka menetap di rumah orang tua suami, dan mereka bekerja menjadi buruh bata di salah satu industri bata di wilayah desa Pengadangan.

Keterbatasan ekonomi pasangan ini ternyata menjadi salah satu faktor penyebab keretakan rumah tangga. Mereka bercerai setelah hampir enam tahun berumah tangga dan memiliki dua orang anak. Setelah bercerai, bu Ni masih menetap di kediaman sang mertua, karena ketiadaan tempat tinggal. Tidak lama setelah itu, ia pun diusir oleh sang mantan mertua, kemudian menumpang di rumah salah satu saudaranya, yang juga berada di desa Pengadangan. Pendapatannya dari hasil menjadi buruh tani, sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beserta kedua orang anaknya. Selain itu, keinginan yang kuat untuk membangun rumah bagi dirinya, kedua anak-anaknya, dan sang ibu yang juga baru bercerai, membulatkan tekadnya untuk menjadi migran di Malaysia.

Ia berangkat dengan Tahun 1999 untuk pertama kalinya ke Malaysia menjadi buruh migran tanpa modal apapun karena semua biaya menjadi tanggungan PJTKI yang memberangkatkannya. Di Malaysia, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dengan gaji per bulan sebesar 300 ringgit.

Sampai saat ini ia masih bekerja di Malaysia dan sudah 5 kali ia pulang ke rumahnya. Setelah 1 Otahun bekerja gajinya kini 750 ringgit sebulan. Tidak setiap bulan ia mengirim uang gajinya dan jumlah yang dikirim pun tidak tentu, kadang-kadang lima juta rupiah, tiga juta rupiah, atau empat juta. Ia mengirim melalui bank keluarga yang dimiliki oleh salah satu keluarganya, melalui bank BNI.

Ketika pertama kali pulang pada tahun 2001, ia mampu membeli tanah dengan harga delapan juta rupiah. Hanya satu bulan berada di rumah saudaranya, ia kembali ke Malaysia dan bekerja di tempat yang sama. Kedua kali pulang tahun 2003, ia mampu membangun rumah, dengan biaya sekitar 13 juta rupiah. Bu Ni meminta gaji kepada sang majikan untuk beberapa bulan ke depan untuk biaya membangun rumah di desa. Sang majikan dengan

murah hati memberikan gaji untuk beberapa bulan ke depan. Hanya satu bulan ia di desa, ia pun kembali lagi bekerja di majikan yang sama. Pada kepulangan berikutnya dan yang terakhir beberapa minggu yang lalu, hasil pendapatannya hanya digunakan untuk membiayai kehidupan keluarganya serta anak bungsunya yang duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sedangkan anak pertamanya yang telah berusia 19 tahun, baru menikah dan tinggal bersama sang suami.

Ibu Ni tidak menggunakan uang hasil kerjanya untuk membeli lahan atau hewan ternak sebagai investasi dan tabungan, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh warga desa Pengadangan. Namun ia mengaku memiliki tabungan.

Saat ini, rumah yang dibangun ditinggali oleh ibunya dan dua adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan bangku sekolah menengah pertama. Sedangkan anak bungsunya tinggal bersama saudaranya, karena merasa lebih dekat dan nyaman tinggal dengan sang saudara. Rumah bu Ni cukup besar, bercat berwarna merah muda yang digunakan masih sesuai warna aslinya, belum pudar. Walaupun lantainya hanya berupa plesteran semen, kondisi rumah jauh berbeda dengan rumah-rumah penduduk lainnya. Di dalam rumah terdapat sebuah televisi berukuran 14 inci yang diletakkan di sebuah lemari besar yang terlihat masih bagus. Sama seperti rumah-rumah warga lainnya, walaupun rumah ini bagus, namun tidak tersedia wc di dalam rumah. WC dan sumur terletak di depan rumah yang jaraknya sekitar 10 meter dari depan rumah. Masih seadanya, cukup sempit, dengan ditutupi seng, dan berinding tembok yang hanya diplester kasar.

(Sumber: Catatan Lapangan NTB, 2009)

Kotak 2 Profil Buruh Migran Laki-laki

Pak Tri berusia 33 tahun memiliki empat orang anak, dengan 3 orang anak kandung dan kesemuanya masih duduk di bangku sekolah dasar, dan 1 orang anak angkat yang tengah duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP Satu Atap Desa Bijepunu). Rumahnya tidak begitu besar dengan sumber penerangan hanya sebuah pelita kecil terletak di Dusun Tunbes yang paling jauh dari desa.

Tahun 1997 ia berdagang bawang putih di Pasar Soe, TTS, dan hanya pulang seminggu sekali. Barang dagangannya bukanlah hasil kebun sendiri melainkan dibeli di Kupang. Pada masa itu untuk memulai usaha sangatlah sulit, kalau memang tidak punya kemampuan modal. Penghasilannya berdagang tidak mencukupi apalagi saat itu istrinya tidak bekerja dan hanya mengurus rumah saja. jumlah pembeli dari hari ke hari sendiri juga tidak begitu meningkat. Akhirnya ia memndahkan usahanya ke pasar Kapan, agar dapat memperkecil biaya transportasi, namun hasilnya tidak begitu baik juga. Setelah dinilai bahwa usahanya tidak lagi maju, akhirnya ia memulai pekerjaan baru sebagai petani lahan orang, namun kegiatan tersebut juga tidak begitu banyak membantu ekonomi di luar konsumsi keluarga. Pendapatan yang hanya berkisar antara 150 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah perbulan hanya dapat mencukupi kebutuhan makan dan minum.

Hingga akhirnya, setelah mendapatkan informasi tentang tata cara pemberangkatan TKI melalui sebuah perusahaan di Kupang, ia memutuskan untuk bekerja di Malaysia. Untuk biaya keberangkatan menuju Malaysia ia dapat dari hutangan kerabat dan pinjaman PJTKI, dan pada tahun 2006 ia berangkat ke Malaysia.

Di Malaysia, ia bekerja sebagai buruh kebun bunga di sebuah perusahaan bunga di Johor Baru Malaysia, di kota Kulei. Gajinya mencapai 600 ringgit dengan cicilan potongan hutang kepada PT selama 6 bulan sebesar Rp.1.500.000,- per bulan. Selama berada di Malaysia, ia tinggal dalam satu mes perusahaan sedangkan untuk biaya makan dan komunikasi, harus di tanggung sendiri. Pekerjaan yang dilakukan adalah menanam beberapa jenis bunga dan keterampilan tersebut sudah di dapatnya selama berada di Indonesia.

Dengan gaji sebesar 600 ringgit, bapak Yatri mengirimkan uang sebesar tujuh juta rupiah per tiga bulan kepada istrinya. Dan dengan persetujuan dirinya, uang tersebut digunakan untuk membiayai ke-empat anaknya untuk menempuh pendidikan. Selain untuk pendidikan, uang tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menutupi

hutang yang pernah di pinjamnya untuk bekal pergi ke Malaysia.

Selama dua tahun bekerja di Malaysia, ia merasa senang karena di Malaysia semua dihargai dengan uang. Berbeda dengan saat masih di kampung. Bekerja kebun siang malam belum tentu mendapatkan hasil uang yang besar. Namun hal yang paling tidak di senangi kebanyakan dari kawan-kawan TKI juga dirinya, adalah bila mereka memiliki majikan yang tidak baik. Dalam hal ini pelit, karena terkadang mereka harus mengerjakan beberapa pekerjaan yang bukan kewajibannya namun tidak di bayar.

Perubahan yang dirasakan oleh pak Tri adalah kemajuan dari anak-anaknya dalam menempuh pendidikan. Karena dahulu menurut dirinya, kalau saja ia tidak memutuskan untuk pergi mungkin pendidikan anak-anaknya tidak akan terjamin. Bahkan dengan bangganya beliau menyebutkan bahwa anak angkatnya yang SMP tersebut salah satu juara kelas.

Saat tiba di Indonesia, hasil atau sisa gaji yang dibawa pulang jumlahnya berkisar 20 juta. Uang itu kemudian digunakan untuk menutupi hutang yang masih belum terbayar dan juga untuk konsumsi rumah tangganya. Selain itu, sebagian dari uang itu digunakan untuk bekal istrinya yang sekarang menjadi buruh migran di Malaysia. Istrinya sekarang sudah berada selama delapan bulan di Malaysia, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kawasan Syah Alam, Selangor, Malaysia.

Saat di tanya tentang kemungkinan kembalinya beliau ke Malaysia, ia mengatakan bahwa keinginan tersebut memang ada, namun ia harus menunggu kembali dahulu istrinya, dan untuk sementara ini bekerja sebagai petani kebun di lahan milik ayahnya.

(Sumber: Catatan Lapangan NTT 2009)

BAB 4

MASYARAKAT DESA DI ANTARA KRISIS

Bab ini memberikan gambaran mengenai pemahaman dan pengalaman krisis di masyarakat desa NTT dan NTB. Selain dua krisis besar internasional tahun 1997 dan 2008, warga desa NTT dan NTB juga mengenal krisis lokal yang berkaitan dengan ketersediaan pangan dan kemiskinan. Sebagai masyarakat miskin, sesungguhnya mereka selalu hidup dalam krisis karena hampir selalu berada dalam situasi tak menentu dan tak pasti. Situasi krisis selalu membawa dampak dan membutuhkan usaha dan strategi untuk menghadapinya agar tetap bertahan atau mampu keluar dari situasi tersebut, yang dilakukan secara individual hingga kolektif. Akan diuraikan pula berbagai dampak dan tindakan yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi krisis.

Krisis Global dan Krisis Lokal

Warga desa NTT memiliki pengertian dan pengalaman krisis yang panjang dan berulang. Krisis ekonomi tahun 1997 hanya salah satu dari krisis yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka, faktor alam dan sumber daya manusia merupakan kontributor siklus krisis lokal yang datang berulang.

Setiap kali memperbincangkan tentang krisis maka, krisis ekonomi tahun 1997 merupakan krisis yang sangat memukul ekonomi sebagian besar warga masyarakat desa Ajoabaki terutama karena kenaikan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Saat ketergantungan warga masyarakat terhadap kebutuhan pokok di pasar mulai meningkat, pada masa itulah krisis tahun 1997 mereka rasakan.

Selain krisis regional tersebut, kekeringan yang panjang yang memunculkan masa paceklik dalam berkebun juga menjadi masa krisis bagi warga. Kekeringan yang panjang mengacaukan waktu panen yang seharusnya datang pada Januari harus di tunda sampai bulan Maret. Penundaan tersebut jelas merugikan karena merusak rencana panen dan pemasukan uang dan akibatnya menimbulkan kesulitan keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Situasi tersebut semakin berat karena kurangnya lapangan pekerjaan yang dilakukan baik di desa atau di kota kabupaten, sehingga pemenuhan kebutuhan hidup tetap tak dapat dilakukan. Masa krisis seperti itu diungkapkan dalam kalimat :

“Tidak ada kerja berarti tidak ada uang, dan berarti tidak ada makan”

Krisis lain yang dialami warga adalah krisis pangan yang melanda kabupaten TTS pada umumnya dan desa Ajoabaki pada khususnya. Sekitar 114 ribu orang di TTS menurut catatan dokumentasi mengalami krisis pangan. Yang dimaksud dengan krisis pangan adalah langkanya beras dan naiknya harga beras di pasar karena musim kering yang terlalu panjang⁷. Namun pengertian krisis pangan ini sendiri selalu ditentang baik oleh bapak kepala desa ataupun warga masyarakat. Bagi mereka, apa yang menjadi pengertian krisis pangan adalah salah kaprah, karena walaupun memang terjadi kelangkaan beras di pasar, namun warga masyarakat masih dapat makan jagung yang sebenarnya makan lokal penduduk NTT.

Warga desa NTB juga mengalami kenaikan harga bahan kebutuhan pokok seperti susu dan gula pasir ketika terjadi krisis 1997, meskipun mereka tidak mengetahui bahwa sedang terjadi krisis regional. Bagi warga desa, masa krisis adalah saat ketika mereka kesulitan untuk makan dan kesulitan untuk mendapatkan beras. Situasi semacam itu pernah terjadi sekitar tahun 1970-an. Pada saat itu, penghasilan petani sering tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, sebab ketika itu hanya kepala keluarga lah yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya yang berjumlah lebih dari empat orang (Saat itu masyarakat belum mengenal KB, sehingga keluarga memiliki banyak anak). Kesulitan makan saat ini sudah tidak terjadi lagi. Bagi warga desa NTB, selama masih dapat menikmati makan setiap hari, ibaratnya walaupun makan hanya dengan sayur dan nasi, atau bahkan nasi dengan garam, mereka tidak menganggap hal tersebut sebagai krisis. Saat ini, masih ada masyarakat yang mengalami kekurangan makan seperti itu, namun hanya terjadi di pelosok-pelosok desa.

Krisis global yang baru terjadi tahun 2008 hampir tak menampakkan jejaknya pada masyarakat desa NTT dan NTB. Terpisahnya ekonomi masyarakat dari ekonomi global menjadi faktor yang menyebabkan hal itu. Ketika migrasi dijadikan indikator dampak krisis global, dinamika migrasi warga desa tidak terganggu. Tidak ada arus balik migrasi dari luar negeri yang terjadi, dan arus keluar migrasi berada dalam posisi yang relatif stabil. Data dari kantor BP3TKI NTT memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2008 hingga Juni 2009 tidak ada angka pemulangan yang menonjol dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Data

⁷ Dari catatan dokumentasi, bila tahun 2000-2003 harga beras sekitar Rp 3.000/kg pada tahun 2005 naik menjadi Rp 4.000. Bahkan pada masa-masa tersebut ada yang menjualnya dengan harga Rp 4.500/kg. Hal ini juga terjadi pada beras termurah (beras lokal) yang pada tahun 2000-2003 seharga Rp 2.250/kg, pada tahun 2005 mencapai Rp 3.500 (dikutip dari, Pembaruan tanggal 19 Maret 2005).

kantor BP3TKI NTB menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 jumlah migran terus meningkat: dari data penempatan TKI tahun 2007 migrant dari NTB berjumlah 43.134 orang, tahun 2008 jumlahnya bertambah mencapai 52.273 orang dan untuk semester pertama 2009 jumlahnya sudah mencapai 33.255 orang. Data resmi ini menunjukkan tak ada dampak krisis terhadap arus balik migran NTB.

Dampak Krisis dan Mekanisme Bertahan

Setiap krisis berdampak pada gangguan pemenuhan kebutuhan primer keluarga karena berkurangnya kemampuan atau daya beli. Implikasi lanjutannya adalah usaha untuk bertahan dan tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan melalui berbagai cara. Berbagai pengalaman masyarakat menghadapi krisis lokal maupun regional menunjukkan bahwa krisis menimbulkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga karena penghasilan tidak ada. Krisis karena musim kering panjang yang menyebabkan gagal panen berakibat berkurangnya persediaan pangan hasil kebun sehingga harus dibeli sementara persediaan uang sangat tipis atau hampir tidak ada.

Warga desa NTB memiliki strategi untuk menanggulangi masa krisis dengan cara berhutang kepada pemilik warung, biasanya berhutang beras, atau mencari pinjaman uang/ beras kepada tetangga sekitar, atau meminjam uang kepada majikan yakni pemilik usaha bata tempat mereka bekerja. Usaha yang terakhir ini - menghutang kepada majikan/pemilik usaha - karena lebih mudah untuk membayar hutang dengan cara langsung memotong upah mereka. Meminjam uang kepada pemilik usaha bata tempat mereka bekerja juga mudah, karena sistem buruh di usaha bata adalah buruh tetap. Jadi, pemilik usaha pun tidak segan memberikan pinjaman uang. Sistem pengembalian pinjaman pun dianggap lebih mudah karena tidak perlu membayar dengan uang, namun dengan tenaga. Selain mencari pinjaman pada waktu krisis, warga desa juga berusaha mencari pekerjaan berburuh.

Warga desa NTT dalam menghadapi krisis agar dapat bertahan juga melakukan upaya-upaya serupa yakni berhutang baik uang maupun bahan makanan kepada tetangga atau berhutang ke warung atau mengandalkan pemberian atau pinjaman bahan pangan oleh pemilik lahan garapan, atau bagi rumah tangga yang kepala keluarga sedang bermigrasi menggunakan simpanan kiriman uang. Krisis 97 benar-benar merupakan masa sulit bagi pemilik warung yang menjual bahan kebutuhan pokok karena penduduk yang tidak mempunyai penghasilan berhutang ke warung yang semakin menumpuk dan akhirnya tak terbayar. Daya beli masyarakat juga jauh menurun sehingga jenis dan jumlah bahan kebutuhan yang dibeli juga

terbatas: beras dibeli setengah kilo, gula pasir seperempat kilo dan hampir tak ada yang membeli telur.

Di kedua desa, keputusan untuk meminjam uang dan jumlahnya diputuskan bersama oleh suami-istri sedangkan pelaksanaannya untuk meminjam dilakukan oleh istri, demikian juga pengembaliannya.

Di desa NTT saling membantu antara suami dan istri menjadi salah satu strategi yang sering dilakukan pada masa krisis. Dalam hal ini peranan perempuan/istri menjadi sangat penting dalam menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga. Pada masa sulit karena paceklik atau gagal panen perempuan mencari tambahan penghasilan dengan menjahit selendang pesanan, menjual hasil kebun seadanya, atau bahkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah lain. Peran perempuan semacam ini disosialisasikan oleh para ibu kepada anak-anaknya yang perempuan, sehingga banyak dari anak-anak perempuan di desa ini sudah bisa melakukan kegiatan menyulam, atau *bertofa*. Harapannya kelak anak-anak gadis itu jika telah menikah dapat membantu suaminya jika dalam kesusahan atau krisis.

Bagi masyarakat NTT dan NTB, persoalan utama yang dihadapi saat krisis adalah terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan seperti beras, garam, gula, minyak goreng. Studi ini menemukan bahwa prioritas utama pengeluaran warga desa adalah untuk makan⁸. Oleh karena itu jika masa krisis telah terlewati maka hal pertama yang dilakukan adalah membeli kebutuhan pokok pangan untuk persediaan.

Migrasi ke luar negeri adalah sebuah pilih paling logis untuk keluar dari krisis. Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penghasilan sebagai buruh migran ke luar negeri paling besar dibandingkan dengan pekerjaan lain di desa atau di tempat tujuan lain di dalam negeri. Pada awalnya secara umum kaum lelaki yang berangkat ke luar negeri akan tetapi dalam perkembangannya terutama karena dorongan ekonomi, kaum perempuan yakni para ibu juga semakin banyak yang bekerja di Malaysia. Semakin banyak keluarga yang suami atau istrinya berangkat, dan banyak pula yang pergi secara bergantian.

⁸ Menu makanan sehari-hari warga kedua desa sangat sederhana: nasi dan sayur kol atau sawi ditumis dan kadang-kadang telur atau mi instant di NTT dan nasi dengan sayur bayam atau sawi dan ikan. Daging dikonsumsi kadang-kadang .

Bantuan Pemerintah dan LSM di Masa Krisis

Krisis lokal dalam bentuk rawan pangan yang terjadi secara berkala melahirkan program dari Dinas Sosial untuk menanggulangi rawan pangan dengan pembentukan Komisi Penanggulangan Rawan Pangan yang bertugas memberi bantuan beras dengan menyediakan stok beras sebesar 700 ton per kabupaten per tahun untuk wilayah-wilayah yang paling rawan. Program lain adalah meningkatkan produksi jagung melalui tata cara pertanian jagung modern, serta gerakan kembali makan jagung sebagai makanan pokok.

Program bantuan LSM difokuskan untuk membantu warga mengatasi masalah pangan. Sebuah LSM lokal bernama TLM, memberikan bantuan kepada warga masyarakat berupa Tong Biru Besar yang dapat digunakan sebagai alat penyimpanan jagung agar lebih aman dan awet. Selama ini warga masyarakat masih melakukan penyimpanan jagung di atap dalam rumah, dengan resiko rumah terbakar ketika proses pengasapan. LSM lain, sebuah LSM internasional bernama WFP sejak tahun 2005 memberikan bantuan biskuit untuk anak-anak balita, saat pemerintah provinsi menyatakan bahwa Timor Tengah Selatan atau TTS adalah kabupaten yang mengalami krisis pangan. Program bantuan biskuit ini tampaknya tidak terlalu efektif karena biskuit itu justru dijadikan hidangan untuk menjamu tamu yang datang, termasuk ketika peneliti mengunjungi rumah-rumah informan untuk melakukan wawancara. Sebuah LSM lain pernah bermaksud untuk membantu pengadaan air bersih untuk warga desa, akan tetapi tidak ada informasi mengenai kelanjutan atau realisasinya walau pada kenyataannya, air adalah kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh warga masyarakat.

Di lingkungan desa NTB tak ada LSM yang melakukan kegiatan di sana yang secara spesifik membantu masyarakat menanggulangi krisis. Kebanyakan LSM di wilayah kabupaten bergerak mulai bidang penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator warga dalam menentukan dan menyusun rencana pembangunan desa, mendampingi masyarakat mengelola hutan, penguatan kapasitas ekonomi keluarga miskin dan pendampingan para buruh migran sejak persiapan keberangkatan hingga kembali ke desa dalam aspek perlindungan dan pemahaman hak.

Kondisi krisis yang berwujud kemiskinan mengundang paling banyak program bantuan pemerintah. Program nasional pemerintah untuk masyarakat miskin karena kenaikan harga BBM dengan memberikan dana bantuan sekolah atau BOS, bantuan dana tunai atau BLT, bantuan tunai bersyarat atau PKH, pembagian beras untuk orang miskin atau Raskin, juga

dinikmati oleh warga desa di NTT dan NTB. Bantuan lain adalah jaminan kesehatan atau Jamkesmas dalam bentuk pengobatan gratis di puskesmas. Selain itu di desa NTT dan NTB juga ada program penanggulangan kemiskinan P2KP dan PNPB.

Di desa NTT, bantuan beras miskin diberikan setiap 3 bulan sekali kepada rumah tangga yang dikategorikan miskin sesuai dengan kriteria pemerintah dan setiap keluarga menerima 15 kilogram beras. BLT atau Bantuan Langsung Tunai diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pada tahun 2006. Bantuan BLT diberikan setiap tiga bulan sekali di kantor desa, dengan besaran Rp. 100.000,- perbulan, sehingga masing-masing keluarga menerima Rp.300.000,-. Bantuan ini diberikan kepada 174 kepala keluarga yang tinggal di desa Ajoabaki, dan bulan April adalah bulan terakhir kalinya penduduk desa menerima BLT.

Selain BLT, juga ada bantuan bagi Lansia atau masyarakat lanjut usia dari BKKBN melalui Dinas Sosial, yang besarnya sekitar Rp.300.000 perbulan dan dibayar setiap tiga bulan sekali. Bantuan tersebut ditujukan kepada para orang tua yang sudah tidak memiliki pekerjaan, dan hidup dalam pengertian kemiskinan versi pemerintah. Jumlah penerimanya sekitar 13 orang.

Program bantuan pemerintah yang lain yang direncanakan dijalankan adalah PKH (Program Keluarga Harapan). PKH merupakan bantuan yang dikhususkan bagi para ibu-ibu dan wanita yang memiliki anak balita dan anak sekolah untuk pemenuhan gizi mereka. Namun di kedua desa tersebut, bantuan PKH baru sampai pada taraf sosialisasi.

Bantuan PNPB di desa Ajoabaki, masuk sekitar tahun 2008. Satu Polindes, kemudian penambahan dua ruang kelas di sekolah yang ada di desa Ajoabaki (SD Inpres Sikam, SD GMIT) adalah hasil yang didapat oleh desa melalui bantuan PNPB.

Dari berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, BLT merupakan bantuan yang paling di idam-idamkan oleh penduduk desa . Karena pada praktiknya, BLT yang didapat oleh penduduk desa tersebut, dapat digunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan pokok, kemudian uang jajan anak, dan kebutuhan untuk membeli bibit pertanian.

Bantuan Operasional Sekolah atau BOS diberikan sebagai beasiswa untuk siswa miskin untuk mencegah putus sekolah. Di desa Ajoabaki dan desa Pengadangan, bantuan ini sudah dapat dinikmati masyarakat.

Selain program-program di atas, terdapat program pemerintah yang khusus ditujukan untuk perempuan, yaitu program Warsosek – Wanita Rawan Sosial Ekonomi dari Departemen Sosial. Program ini ditujukan kepada perempuan dewasa berusia 18-40 tahun yang berstatus

cukup usia nikah, janda, perempuan pekerja seks, perempuan bersuami yang mencari penghasilan tambahan. Kategori perempuan itu dianggap rawan untuk masuk ke dunia prostitusi karena kondisi ekonominya rentan. Untuk mencegah mereka melakukan perbuatan tercela, diberikan berbagai pelatihan keterampilan sebagai bekal untuk dapat mencari uang dengan cara yang baik. Program ini tampaknya sangat bias gender karena hanya menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang dianggap dapat menimbulkan kerawanan sosial. Namun program ini hanya ada di tingkat kabupaten/provinsi, tidak sampai masuk ke desa.

BAB 5

WAJAH PERUBAHAN MASYARAKAT DESA NTT DAN NTB: SEBUAH KESIMPULAN

Masalah kemiskinan belum juga usai di kedua provinsi di Timur Indonesia ini. Keadaan alam dan mutu sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menyebabkan kemiskinan tak juga meninggalkan penduduk NTT dan NTB. Berbagai program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan belum menyentuh persoalan yang mendasar tersebut karena membutuhkan investasi yang besar dan masa yang panjang. Program-program mengatasi kemiskinan cenderung bersifat 'crash program' untuk mencegah warga miskin jatuh ke tingkat kemiskinan yang akut.

Meskipun demikian berbagai upaya memperbaiki sarana fisik untuk peningkatan sarana dan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan mobilitas bagi masyarakat terus dilakukan. Demikian juga untuk sarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta pelayanan terhadap buruh migran ke luar negeri yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat desa NTT dan NTB.

Dalam kurun satu dekade lebih, upaya-upaya perbaikan tersebut menampakkan hasilnya. Terdapat peningkatan indeks pembangunan manusia, angka partisipasi sekolah, kesadaran terhadap kesehatan. Selain itu, meskipun pertanian masih mendominasi mata pencarian penduduk, terdapat peningkatan sumber mata pencarian di luar pertanian, khususnya migrasi dan kegiatan industri kecil. Namun demikian peningkatan-peningkatan tersebut masih belum terlalu berhasil membawa NTT dan NTB keluar dari kemiskinan, antara lain ditunjukkan dengan masih tetap rendahnya IPM kedua provinsi tersebut.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan respon terhadap krisis moneter Asia 1997 yang bertujuan sebagai jaring pengaman. Selain itu juga dibuat program yang bersifat berkelanjutan. Di antara program untuk merespon krisis tersebut adalah Jaring Pengaman Sosial dan Program Padat Karya, serta P2KP dan PPK yang kemudian menjadi PNPM.

Paket program penanggulangan kemiskinan yang lain diluncurkan tahun 2005 dengan tujuan memberikan kompensasi kepada warga miskin karena kenaikan BBM dan tarif dasar listrik. Program-program tersebut adalah BLT, RASKIN, BOS, PKH, JAMKESMAS.

Program-program pemerintah pusat tersebut turun di tingkat regional dan dirasakan oleh masyarakat desa termasuk di NTT dan NTB. Selain itu pemerintah provinsi juga membuat program-program lokal untuk mengatasi persoalan lokal yang berkaitan dengan krisis dan kemiskinan. Di tingkat lokal seperti di NTT misalnya, musim kering merupakan penanda krisis pangan karena kegiatan pertanian terganggu. Untuk itu dibuat program ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi pertanian jagung dan gerakan kembali ke pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras.

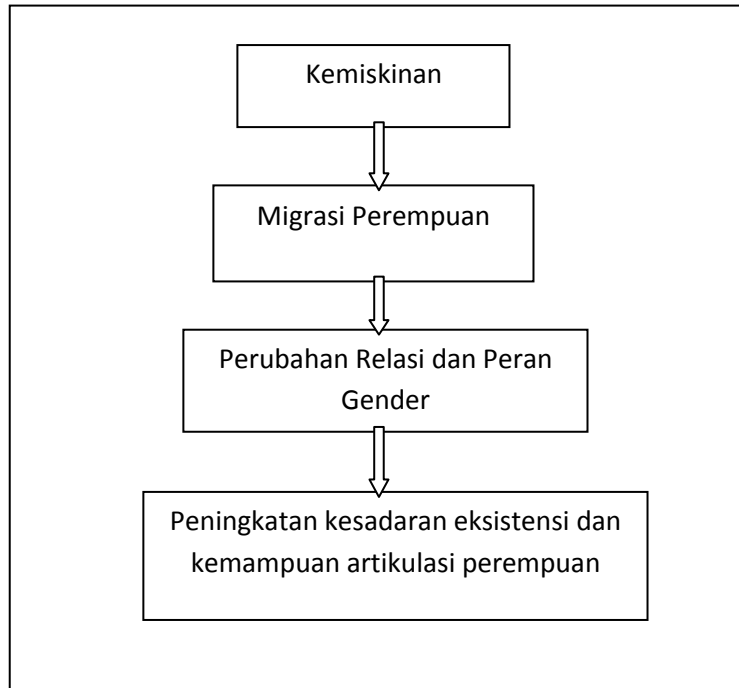
Salah satu program pengentasan kemiskinan yang menjadi unggulan adalah program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk menjawab persoalan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Program ini dilengkapi dengan berbagai institusi pendukung dan peraturan-peraturan legal formal yang ada di tingkat pusat hingga desa.

Studi ini menemukan bukti-bukti yang kuat bagaimana migrasi digunakan sebagai salah satu strategi mengatasi kemiskinan oleh masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah buruh migran lelaki maupun perempuan, meningkatnya jumlah calo dan jasa penyalur tenaga kerja legal maupun illegal, meningkatnya *remittances*, meningkatnya program pemerintah maupun LSM untuk melayani calon dan mantan buruh migrant merupakan indikator semakin banyaknya warga NTT dan NTB yang memilih migrasi untuk mengeluarkan diri dari kemiskinan, seperti juga di daerah-daerah pengirim migran terbesar di Indonesia. Bagi penduduk miskin yang kesempatan kerja dan berpenghasilannya yang sangat terbatas, melihat migrasi adalah jalan keluar apalagi dengan tingkat upah yang berpuluh kali lipat dibandingkan yang bisa diperoleh di dalam negeri.

Studi ini juga menemukan bukti awal bagaimana migrasi mampu mengubah tatanan sosialkultural masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peran gender dan sekaligus mengubah penampilan perempuan desa. Ketika keputusan perempuan untuk bermigrasi diambil karena dorongan kemiskinan, pada saat itu juga telah terjadi perubahan peran gender dalam rumah tangga di mana perempuan memberikan kontribusi ekonomi yang dominan dan tidak jarang menjadi pencari nafkah utama. Pada ketika itu juga konstruksi *social cultural* mengenai tempat perempuan yang seharusnya di lingkup domestik telah mengalami dekonstruksi. Dalam masalah migrasi, dengan semakin meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar negeri dan menjadi penyangga utama kehidupan rumah tangga telah dengan sendirinya menjadi penanda bahwa kerja perempuan tidak lagi sebatas ruang domestik. Perempuan telah menjadi pelaku aktif di ruang publik. Implikasi lanjutan dari aktivitas perempuan di ruang publik adalah meningkatnya kesadaran perempuan

terhadap eksistensi diri dan bersamaan dengan itu kemampuan mengartikulasi diri juga meningkat, dibandingkan dengan perempuan yang tidak migrasi. Secara ringkas keterkaitan kemiskinan, migrasi dan perempuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Kotak 3
Keterkaitan Kemiskinan, Migrasi, dan Perempuan



Sebagai daerah dengan kemiskinan yang cukup kronis, penduduk desa di NTT dan NTB terbiasa hidup ditengah krisis. Selain krisis kecil atau individual di tingkat rumah tangga, masyarakat desa di NTT dan NTB juga terbiasa menghadapi krisis lokal karena perubahan iklim. Namun demikian krisis di tingkat nasional pun dirasakan memperberat kemiskinan mereka. Krisis finansial 1997 dirasakan oleh masyarakat pedesaan NTT dan NTB dalam bentuk kenaikan harga bahan pokok terutama yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri. Satu wujud berbagai krisis multi level tersebut adalah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Uang susah di dapat sehingga tak dapat atau mengalami kesulitan untuk membeli bahan kebutuhan hidup.

Kebiasaan hidup secara subsisten dengan memenuhi kebutuhan pangan sendiri dari hasil kebun/produksi sendiri atau melalui pertukaran antar rumah tangga berperan penting dalam menentukan derajat dampak krisis dan cara mengatasi dampak. Cara hidup demikian membuat mereka lebih kurang terkena dampak krisis. Krisis lokal ditanggulangi dengan mengandalkan tolong menolong di antara rumah tangga atau berhutang. Ketika ekonomi

uang mulai menggantikan ekonomi subsisten dampak krisis menjadi lebih terasa. Barang kebutuhan pokok yang kini semakin banyak dibeli daripada dibuat sendiri menjadi pintu masuk bagi masyarakat desa di NTT dan NTB ke dalam ekonomi pasar. Kecenderungan ini dapat menyebabkan masyarakat desa menjadi rentan terhadap krisis seperti yang di alami warga di kedua desa penelitian ketika terjadi krisis 97.

Di tingkat rumah tangga, kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga selain diatasi dengan sistem sumbang-menyumbang, juga dilakukan dengan cara berhutang ke warung, majikan dan tetangga. Mengurangi pembelian jenis dan jumlah kebutuhan atau menunda pemenuhan kebutuhan juga dilakukan sebagai siasat menghadapi krisis.

Krisis financial global 2008 tidak menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat desa di NTT dan NTB. Indikatornya adalah tidak terjadi penurunan jumlah migran keluar atau migran yang pulang yang dijadikan salah satu indikator dampak krisis global ini. Tren pengiriman buruh migran yang naik dari tahun 2008 dan 2009 memperlihatkankannya.

Perubahan-perubahan di atas memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat desa secara umum sudah lebih baik dari sisi pendidikan dan kesehatan serta perumahan. Kesulitan memenuhi kebutuhan hidup berkurang karena daya beli meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja berupah, terlebih kesempatan bekerja di luar negeri. Dalam pandangan seorang warga desa, seorang janda yang anaknya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, perbaikan kondisi hidup digambarkan sebagai berikut:

Kotak 4
Ilustrasi Perbaikan Kondisi Hidup TKI

“Sampai saat ini, perubahan yang dirasakan oleh Ibu Sal terasa semakin baik. Dahulu, ia merasa sulit membeli beras karena keterbatasan uang yang dimiliki, namun saat ini, ia dan keluarga tidak lagi memikirkan mengenai kebutuhan ekonomi, karena uang hasil remitansi ibu Sukarni dan ketiga anak lainnya yang menjadi migran selalu ada untuk membantunya memenuhi kebutuhan ekonominya. Menurutnya, anak merupakan modal orang tua untuk menghadapi masa tua orang tua. Ibu Salmiah sejak dahulu memang mendambakan kedelapan anak yang dimilikinya hasil pernikahannya dengantiga orang mantan suaminya ini dapat membantunya untukmenghidupi dan memenuhi segala kebutuhannya untuk hari tua .Harapan itu, kini menjadi kenyataan”.

Sumber: Catatan Lapangan NTB, 2009

Berbagai program pemerintah juga membantu masyarakat miskin dalam mengatasi krisis. Beberapa program LSM untuk membantu masyarakat mengatasi krisis pangan di NTT tampaknya kurang efektif dan perlu diketahui sebabnya. Sebuah temuan menarik dari studi ini adalah kesulitan air bersih yang dialami warga desa NTT justru tidak menjadi prioritas program baik oleh pemerintah maupun LSM, sementara persoalan itu adalah persoalan yang paling pokok bagi warga desa. Dalam hal ini telah terjadi kesenjangan antara kebutuhan warga dan agenda program intervensi.

Daftar Pustaka

- AKATIGA. (2001). *Perempuan Miskin Kota Melawan Krisis*. Bandung: AKATIGA.
- AKATIGA. (2007). *The ATC Phase Out and the Indonesian Textile and Clothing Industry: Where Do We Stand*. Bandung: AKATIGA.
- Antara News. (2008, May 12). *Ratusan Kades Tolak BLT yang Dianggap Biang Gejolak Sosial*. Retrieved November 25, 2009, from Antara News : <http://www.antara.co.id/arc/2008/5/16/ratusan-kades-tolak-blt-yang-dianggap-biang-gejolak/>
- Bank Dunia. (2006). *Inovasi Pelayanan Pro-Miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Bank Dunia.
- Bank Indonesia Mataram. (2009a). *Kajian Ekonomi Regional Nusa Tenggara Barat Triwulan I Tahun 2009*. Mataram: Bank Indonesia Mataram.
- Bank Indonesia Mataram. (2009b). *Kajian Ekonomi Regional Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun 2009*. Mataram: Bank Indonesia Mataram.
- Bank Indonesia Mataram. (2009c). *Kajian Ekonomi Regional Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2009*. Mataram: Bank Indonesia Mataram.
- Barlow, C., & Gondowarsito, R. (2007). *Socio-economic Condition and Poverty Alleviation in Nusa Tenggara Timur*.
- BP3TKI NTT. (2009). *Data Pengiriman TKI*. Kupang: BP3TKI NTT.
- BP3TKI NTT. (2009). *Rekapitulasi Remittance Provinsi NTT (Januari - Desember 2008)*. Kupang: BP3TKI NTT.
- BPS. (2006). *Berita Resmi Statistik*: . Jakarta: BPS.
- BPS NTB . (2001). *Kecamatan Pringgasela dalam Angka* . Mataram: BPS.
- BPS NTB. (2003). *Kecamatan Pringgasela dalam Angka 2003*. BPS NTB.
- BPS NTB. (2007). *Kecamatan Pringgasela dalam Angkat 2007*. Mataram: BPS.
- BPS Nusa Tenggara Barat. (2007). *Kabupaten Lombok Timur dalam Angka*. Mataram: BPS NTB.
- BPS Nusa Tenggara Barat. (2008). *Nusa Tenggara Barat dalam Angka*. Mataram: BPS.

- BPS Nusa Tenggara Timur. (208). *Kecamatan Mollo Utara dalam Angka*. Soe: BPS .
- BPS Nusa Tenggara Timur. (2009). *Profil Kemiskinan Provinsi NTT*. Kupang: BPS.
- BPS Nusa Tenggara Timur. (2009). *Profil Penduduk NTT Tahun 2009*. Kupang: BPS.
- BPS Nusa Tenggara Timur. (2008). *TTS dalam Angka*. Soe: BPS Nusa Tenggara Timur.
- CWS, Hellen Keller International, Care International Indonesia, UNICEF, OCHA. (2008). *Nutrition Survey in Nusa Tenggara Timur*. Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Siaran pers: Departemen Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved November 22, 2009, from http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/siaranpers/siaranpdf%5CKonferensi_Pers_APBN_2009.pdf
- Departemen Sosial. (2007, Juni 30). *Mari Mengenal PKH*. Retrieved November 23, 2009, from Departemen Sosial Republik Indonesia: <http://www.depsos.go.id>
- Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur. (2007, Januari 1). *Tembakau Virginia dan Kelestarian Lingkungan*. Retrieved Oktober 2009, from Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur: <http://www.distannak.lomboktimurkab.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=22>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur. (2006). *Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2006*. Soe: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur.
- Disnakertrans Kabupaten TTS. (2009). *Daftar Pencari Kerja, Angkatan Kerja, dan Pengiriman TKI*. Soe: Disnakertrans TTS.
- Hulme, D., Moore, K., & Sherperd, A. (2001). *Chronic Poverty: Meanings and Analytical Frameworks*. Manchester: Chronic Poverty Research Center, University of Manchester.
- Kantor Bank Indonesia Kupang. (2009a). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2009*. Kupang: Kantor Bank Indonesia Kupang.
- Kantor Bank Indonesia Kupang. (2009b). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2009*. Kupang: Kantor Bank Indonesia Kupang.
- Kantor Bank Indonesia Kupang. (2009c). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III Tahun 2009*. Kupang: Bank Indonesia Kantor Cabang Kupang.
- Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Timor Tengah Selatan. (2008). *Profil Data Isian Desa*. Soe: Kantor PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. (2009, Agustus 22). *Berita-Menko Kesra*. Retrieved November 24, 2009, from Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia : <http://www.menkokesra.go.id/content/view/4909/1/>

Komang. (2009, Agustus 11). Staf BP3TKI. (S. Hermaniar, Interviewer)

Kompas Online. (2009, Juni 15). *GKM Tolak BLT dari Utang Luar Negeri*. Retrieved November 25, 2009, from Kompas.com: <http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/06/15/17065699/GKM.Tolak.BLT.dari.Utangg.Luar.Negeri>

Kontan Online. (2009, Juli 7). *Bappenas Akui Ada Kecurangan di BLT*. Retrieved November 25, 2009, from Kontan Online: http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/17285/Bappenas_Akui_Ada_Kecurangan_di_BLT

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2009). *Profil Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Retrieved November 25, 2009, from Website Resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat: http://ntb.go.id/bankdata/profil_osek.php

(2009). *Profil Desa Ajoabaki 2009*.

(2008). *Profil Desa Pengadangan 2008*.

Setia, R. (2005). *Gali Tutup Lubang Itu Biasa: Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu (Borrowing from Peter to Pay Paul: Workers' Coping Strategies Time after Time)*. Bandung: AKATIGA.

Shah, A. (2009, July 25). *Global Financial Crisis*. Retrieved November 19, 2009, from <http://www.globalissues.org/article/768/global-financial-crisis>

SMERU. (2009). *SMERU Current Research* . Retrieved November 23, 2009, from www.smeru.or.id

Strauss, J., Beegle, K., Dwiyanto, A., Herawaty, Y., Pattinasarany, D., Satriawan, E., et al. (2004). *Indonesian Living Standards Before and After Financial Crisis: Evidence from the Indonesia Family Life Survey*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, RAND Labor and Population Center for the Study of the Family in Economic Development, and University of Gadjah Mada Yogyakarta.

Tititheruw, I. S., Soeastro, H., & Atje, R. (2009). *Global Financial Crisis Discussion Paper 6: Indonesia*. London: Overseas Development Institute.

Widjaja, M. (2009). An Economic and Social Review on Indonesian Direct Cash Transfer Program to Poor Families Year 2005. *Public Policy Analysis and Management International Conference "Asian Social Protection in Comparative Perspective"* (p. 19). Singapore: n.a.

World Bank. (2006). Fact Sheet: Migration, Remittance, and Female Migrant Workers. 8.

World Bank;. (2009, March 11). www.worldbank.org. Retrieved November 19, 2009, from <http://go.worldbank.org/3AAFP2R0D0>

Daftar Informan

Jakarta/Bandung

1. Kapal Perempuan : Yanti Mochtar (Direktur)
Ulfa Hidayati (koord Riset)
2. INFID : Wahyu Susilo (International Affair)
3. Akademisi : Erry Seda
4. AusAid : Richard Manning (Counsellor for Decentralization)
5. Solidaritas Perempuan :Thaufiek Zulbahary (Head of Program
Trafficking, HIV, AIDS)
6. Penghubung NTB : Chaidir (kepala kantor penghubung NTB)
7. World Bank :Vivi Alatas (Poverty Team Leader, Senior
Economist)
Ririn Purnamasari (Economist)
8. UNDP : Felicity (Human Development Report Poverty
Reduction Unit)
Achmad Tohari (Research Analyst)
9. ILO Indonesia : Tauvik
10. Studio Driya Media : Ria Johari

Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Prayitno Basuki (Akademisi Kajian ekonomi Regional)
2. Dinas Sosial dan Kependudukan : Legion (Kepala Dinas Bidang Program)
3. LSM YKSSI : Sri
4. LSM Mitra samya : Poernama Sidhi (Direktur)
5. LSM Samanta : Dwi Sudarsono (Direktur)
6. LSM Koslata : M. Shaleh (Divisi Advokasi)
7. BP3TKI : Komang (kepala BP3TKI)

Tingkat Kabupaten Lombok Timur

1. LSM ADBMI : Roma Hidayat (Direktur)
Muhnan (Wakil Direktur)

- 2. Dinas Sosial : Jumeedan (Bagian Fakir Miskin)
- 3. Dinas Tenaga Kerja : Tohari (Bagian Penempatan)
- 4. BPMD : Sekretaris BPMD

Tingkat Desa Pengadangan

- 1. Kantor Desa : Zaenal Asikin (Sekretaris desa Pengadangan)
- 2. Tokoh Masyarakat : Haji Ahmad (Tuan Guru)
- 3. Tokoh Masyarakat : Asipfudin
- 4. Kepala Dusun Gubuk Timuk : H. M. Ali Mustaqiem
- 5. Ketua RT Aik Jaong : Suwandi
- 6. Pegawai P2KP & Fasilitator ADBMI : Sahrudin
- 7. Madrasah Aliyah : Muhardi (kepala Tata usaha)
- 8. SD & SLTP 1 Atap Pringgasela : Indra (Guru)
- 9. Kader Puskesmas & Posyandu : Leni
- 10. Pemilik Warung : Suryati
- 11. Bidan : Nani
- 12. Dukun beranak : Siti Aisah
- 13. Rumah tangga miskin bermigrasi
- 14. Rumah tangga miskin tanpa anggota keluarga yang bermigrasi
- 15. Rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan

Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 1. Sofia Malelak de-Haan. Ketua Yayasan Alfa Omega.
- 2. Juliana Ndolu. Oxfam GB Kupang.
- 3. Sylvia Fangidae. Ketua PIKUL, NTT.
- 4. Tato Tirang. Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan TKI, BP3TKI Provinsi NTT.
- 5. Pltje, SH. MM. Kepala Seksi Pemulangan dan Pembinaan TKI, BP3TKI Provinsi NTT.
- 6. Linus Kopo Dore. Kepala Pemberdayaan Warga Masyarakat Miskin dan Fakir Miskin, Dinas Sosial Provinsi NTT.
- 7. Ventianus Medi-Sera M. Si. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT

Kabupaten Timor Tengah Selatan

- 1. Cornelis Hale Bau. Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Yunri. Mantan Aktivistis Sangar Suara Perempuan Timor Tengah Selatan.
3. Bill Boim. Mantan Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Desa Ajoabaki

1. Arnold Nitbani. Kepala Desa Ajoabaki.
2. Yatri Tua. Laki-laki dari Rumah Tangga Miskin yang melakukan Migrasi.
3. Melianus Seko. Kepala Sekolah SD Inpres Sikam.
4. Obeth Imanuel Kase. Pemuka Masyarakat Desa Ajoabaki.
5. Drg. Matilda Kase. Kepala Puskesmas Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Margaritha Koenani. Pemilik Kios Desa Ajoabaki.
7. Rumah tangga miskin bermigrasi
8. Rumah tangga miskin tanpa anggota keluarga yang bermigrasi
9. Rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan

Lampiran : Foto



Rumah Keluarga Miskin, Desa Ajoabaki, NTT



Perempuan Desa Ajoabaki, NTT



Lahan Kering di Desa Ajoabaki, NTT



Jalan Menuju Desa Ajoabaki, NTT



Rumah Keluarga Miskin di Desa Pengadangan, NTB



Rumah mantan migran di desa Pengadangan, NTB



Lahan perkebunan tembakau di Pengadangan, NTB



Jalan dari desa Pengadangan ke Kecamatan Pringgasela